

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,  
DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012-2016**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:  
Tri Yuni Pratiwi  
16812147023

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2018**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,  
DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI  
JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2012-2016**

SKRIPSI

Oleh:  
TRI YUNI PRATIWI  
16812147023

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 26 Februari 2018  
Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Pendidikan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui  
Dosen Pembimbing



Moh. Djazari, M. Pd.  
NIP. 19551215-197903 1 003

## PENGESAHAN




Skripsi yang berjudul:

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,  
DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012-2016**


Oleh:  
TRI YUNI PRATIWI  
16812147023

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 April 2018  
dan dinyatakan telah lulus.

### DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Isroah, M.Si.	Ketua Penguji		19/04-2018
Moh. Djazari, M. Pd.	Sekretaris		20/04-2018
Abdullah Taman, SE.Ak, M.Si., C.A	Penguji Utama		18/04-2018

Yogyakarta, 20 April 2018  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Dekan,

  
Dr. Sugiharsono, M. Si.  
NIP. 19550328 198303 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Yuni Pratiwi

NIM : 16812147023

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat orang yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 16 April 2018

Penulis,



Tri Yuni Pratiwi  
NIM. 16812147023

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

1. “Sungguh, bersama kesukaran itu pasti ada kemudahan. Oleh karena itu, jika kamu telah selesai dari suatu tugas, kerjakan tugas lain dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu memohon dan mengharap.” (*Q.S. Al- Insyirah:6-8*)
2. “Allah selalu memberi yang terbaik bagi hamba-Nya. Cukup Allah sebagai penolong dan Dia adalah sebaik-baiknya pelindung”. (*Q.S. Ali-Imran: 173*)

### PERSEMBAHAN:

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SwT, karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Wajiya dan Ibu Siti Aminah tercinta, kasih sayang, doa, semangat dan perjuangan yang diberikann semakin membuat saya untuk berusaha dan terus berusaha sampai menuju kesuksesan hingga dapat menyelesaikan setiap tantangan dalam hidup ini.
2. Kakakku tersayang Aris Sulistyanto dan Sofyan Andi Susilo yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi.
3. Sahabat-sahabatku dan orang tersayang yang selalu membantu dan memberikan semangat.
4. Segenap pihak yang telah memberikan dukungan spiritual, arahan, dan masukan.

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,  
DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012-2016**

Oleh:  
TRI YUNI PRATIWI  
16812147023

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: 1) Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. 2) Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. 3) Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. 4) Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Subjek dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan berasal dari laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012-2016. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Uji prasyarat analisis menggunakan uji asumsi klasik. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana, dan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) di Provinsi Jawa Tengah, dengan nilai koefisien korelasi ( $r_{x_1y}$ ) = 0,733, koefisien determinasi ( $r^2_{x_1y}$ ) = 0,537289 dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu 14,146 > 1,9739. 2) Terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan Dana Perimbangan ( $X_2$ ) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) di Provinsi Jawa Tengah, dengan nilai koefisien korelasi ( $r_{x_2y}$ ) = 0,001, koefisien determinasi ( $r^2_{x_2y}$ ) = 0,000001, dan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu -0,01 < 1,9739. 3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Belanja Modal ( $X_3$ ) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) di Provinsi Jawa Tengah, dengan nilai koefisien korelasi ( $r_{x_3y}$ ) = 0,368, koefisien determinasi ( $r^2_{x_3y}$ ) = 0,135424, nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu 5,189 > 1,9739. 4) Terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), Dana Perimbangan ( $X_2$ ) dan Belanja Modal ( $X_3$ ) secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) di Provinsi Jawa Tengah, dengan nilai koefisien korelasi ( $R_{y(1,2,3)}$ ) = 0,841, koefisien determinasi ( $R^2_{y(1,2,3)}$ ) = 0,707281, dan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu 137,131 > 2,66.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

**THE EFFECT OF ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE,  
INTERGOVERNMENTAL REVENUE, AND CAPITAL EXPENDITURES TOWARD  
FINANCIAL PERFORMANCE OF REGENCY AND MUNICIPAL GOVERNMENTS  
IN THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA FISCAL YEAR 2012-2016**

By:  
TRI YUNI PRATIWI  
16812147023

**ABSTRACT**

*The aims of this research to know the impact of: 1) Original Local Government Revenues to Financial Performance of Regency and Municipal Governments in the Province of Central Java. 2) Intergovernmental Revenue to Financial Performance of Regency and Municipal Governments in the Province of Central Java.3) Capital Expenditures to Financial Performance of Regency and Municipal Governments in the Province of Central Java. 4) Original Local Government Revenues, Intergovernmental Revenue, and Capital Expenditures to Financial Performance of Regency and Municipal Governments in the Province of Central Java.*

*The subject in this research is regency and municipality in the Province from Central Java. The data used comes from Realization Report of APBD fiscal years 2010-2016. The technic of data collection are using documentation method. Pre-paid test analysis is using assumption classic test. The hypothesis test of this research is using simple linear regression analysis and multiple linear regression analysis.*

*The result of the research shows that:1)There are positive and significant effect of Original Local Government Revenue Financial ( $X_1$ ) to Local Government Financial Performance (Y). It showed by correlation coefficient ( $r_{x_1y}$ )= 0,733, determination coefficient ( $r^2_{x_1y}$ )= 0,537289, and  $t$  arithmetic 14,146 >  $t$  table 1,9739. 2)There are positive effect however it not significant of Intergovernmental Revenue ( $X_2$ ) to Local Government Financial Performance (Y). It showed by correlation coefficient ( $r_{x_2y}$ ) = 0,001, determination coefficient ( $r^2_{x_2y}$ ) =0,000001, and  $t$  arithmetic -0,01 <  $t$  table 1,9739.3) There are positive and significant effect of Capital Expenditure ( $X_3$ ) Local Government Financial Performance (Y).It showed by correlation coefficient ( $r_{x_3y}$ )= 0,368, determination coefficient ( $r^2_{x_3y}$ ) =0,135424, and  $t$  arithmetic 5,189 >  $t$  table 1,9739. 4) There are positive effect of Original Local Government Revenue Financial ( $X_1$ ), Intergovernmental Revenue ( $X_2$ ), and Capital Expenditure ( $X_3$ ) to Local Government Financial Performance (Y) It showed correlation coefficient ( $R_{y(1,2,3)}$ )= 0,841, determination coefficient ( $R^2_{y(1,2,3)}$ )= 0,707281 and  $F$  arithmetic 137,131 >  $F$  table 2,66.*

**Keywords :** *Original Local Government Revenues, Intergovernmental Revenue, Capital Expenditures, and financial performance of Regency and Municipal Governments*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji hanya milik Allah SwT. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016” dengan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sugiharsono, M.Si. Dekan Fakultas Ekonomi UNY.
3. Ibu RR. Indah Mustikawati, S. E. Akt., M.Si. Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNY.
4. Bapak Moh. Djazari, M.Pd. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan bimbingan serta pengarahan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
5. Bapak Abdullah Taman, S.E. Ak., M.Si., C.A. Dosen Narasumber yang banyak membantu dan memberikan saran dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi.




6. Ibu Isroah, M.Si. Ketua Penguji yang telah banyak memberikan arahan terhadap penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi yang telah memberikan ilmu bermanfaat selama penulis menimba ilmu.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam pengerjaan Tugas Akhir Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan Tugas Akhir Skripsi ini. Akhirnya harapan penulis mudah-mudahan apa yang terkandung di dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 16 April 2018

Penulis,



Tri Yuni Pratiwi

NIM. 16812147023

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Pembatasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah.....	15
E. Tujuan Penelitian.....	16
F. Manfaat Penelitian.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	19
A. Kajian Teori.....	19
1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	19
a. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	19
b. Arti penting Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	21
c. Tahap-tahap menganalisis Kinerja Keuangan.....	22
d. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan.....	25
e. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	28
f. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	30
2. Pendapatan Asli Daerah.....	35
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	35
b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	36
3. Dana Perimbangan.....	39
a. Pengertian Dana Perimbangan.....	39
b. Pembagian Dana Perimbangan.....	41

4.	Belanja Modal.....	44
a.	Pengertian Belanja Modal .....	44
b.	Peran Belanja Modal .....	45
c.	Jenis-jenis Belanja Modal.....	46
B.	Penelitian yang Relevan .....	48
1.	Penelitian Ayu Tutia Ningsih (2010).....	48
2.	Penelitian Ebit Juliawati, Darwanis, Jalaluddin (2012).....	49
3.	Penelitian Estetika Mutiaranisa Kurniawati (2015).....	50
4.	Penelitian Fajar Nugroho dan Abdul Rohman (2012).....	51
5.	Penelitian Merynda Puspitaningrum (2015).....	52
6.	Penelitian Ratri Patriati (2010).....	53
7.	Penelitian Siti Nur Rochmah (2015) .....	54
C.	Kerangka Berfikir .....	56
1.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	56
2.	Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	57
3.	Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	58
4.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Secara Bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	59
D.	Paradigma Penelitian .....	61
E.	Hipotesis Penelitian .....	62
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>63</b>
A.	Desain Penelitian .....	63
B.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	63
C.	Subjek Penelitian .....	64
D.	Definisi Operasional Variabel .....	64
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	67
F.	Teknik Analisis Data .....	68
1.	Analisis Statistik Deskriptif .....	68
2.	Uji Asumsi Klasik.....	68
a.	Uji Multikolinieritas.....	68
b.	Uji Autokorelasi .....	68
c.	Uji Heteroskedastisitas.....	69
3.	Pengujian Hipotesis.....	70
a.	Analisis Regresi Linear Sederhana .....	70
b.	Analisis Regresi Linear Berganda.....	75

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
A. Hasil Penelitian .....	80
1. Data Umum .....	80
a. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Jawa Tengah .....	80
b. Subjek Penelitian.....	81
2. Data Khusus .....	82
3. Analisis Data .....	87
a. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	87
1) Uji Multikolinearitas .....	87
2) Uji Autokorelasi .....	88
3) Uji Heteroskedastisitas .....	89
b. Pengujian Hipotesis.....	90
1) Analisis Regresi Linier Sederhana .....	90
a) Uji Hipotesis Pertama .....	90
b) Uji Hipotesis Kedua.....	93
c) Uji Hipotesis Ketiga .....	96
2) Analisis Regresi Linier Berganda .....	99
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	102
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	103
2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	105
3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	107
4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Secara Bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	110
C. Keterbatasan Penelitian .....	112
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....	113
A. Simpulan .....	113
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA .....	117
LAMPIRAN.....	121

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Panduan Pengambilan Keputusan <i>DW Test</i> .....	69
2. Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah .....	82
3. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	83
4. Hasil Pengujian Multikolinieritas .....	87
5. Panduan Pengambilan Keputusan <i>DW Test</i> .....	88
6. Hasil Pengujian Autokorelasi.....	88
7. Hasil Pengujian Heterokedastisitas .....	89
8. Hasil Pengujian Regresi Sederhana Hipotesis Pertama.....	91
9. Hasil Pengujian Regresi Sederhana Hipotesis Kedua.....	94
10. Hasil Pengujian Regresi Sederhana Hipotesis Ketiga.....	97
11. Hasil Pengujian Regresi Berganda.....	99

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. <i>Financial Condition Factors</i> .....	26
2. Paradigma Penelitian.....	61
3. Ringkasan Hasil Penelitian .....	102

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Daerah Kabupaten/ Kota Populasi Penelitian .....	121
2. Data Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	122
3. Data Penelitian .....	127
4. Hasil Analisis Regresi .....	132

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas berbagai daerah, baik pulau, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Dalam penyelenggaraan perekonomian, setiap daerah diberi kewenangan sendiri untuk mengelola karena Indonesia menganut asas desentralisasi dengan adanya Otonomi Daerah yang mulai resmi diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Pola –pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah, terlebih setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Lahirnya otonomi ini merupakan perwujudan dari pergeseran sistem pemerintahan yaitu sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi. Adanya penyelenggaraan desentralisasi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Di samping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.



Menurut Mardiasmo (2009:25) secara teoritis, desentralisasi menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu:

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam membangun, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah.
2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang lengkap.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut menekankan adanya pelimpahan wewenang pengelolaan sumber daya keuangan daerah, dengan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan, potensi, dan aspirasi masyarakat mereka dari pada pemerintah pusat. Konsekuensi dari adanya otonomi daerah yaitu harus disertai dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah agar tujuan desentralisasi kekuasaan dapat dicapai. Kenyataan yang terjadi adalah masih tinggi tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat. Terlihat dari persentase Dana Perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 60,82 persen. Dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah penerimaan Dana Perimbangan masing-masing daerah masih diatas 50 persen, dengan rata-rata persentase Dana Perimbangan yang diterima sebesar 61,66 persen (statistik Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2014-2015, data diolah kembali).

Menurut Mardiasmo (2007: 96) pemerintah pusat terlalu dominan terhadap daerah sehingga pola pendekatan yang sentralistik dan seragam yang selama ini dikembangkan oleh pemerintah pusat telah mematikan inisiatif dan kreativitas daerah. Diterimanya Dana Perimbangan oleh masing-masing daerah diatas 50 persen mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Seharusnya dengan meningkatnya Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan utama dari diterimanya dana tersebut, dan juga diimbangi dengan meningkatnya infrastruktur, fasilitas, sarana dan prasarana publik yaitu dengan mengalokasikan penerimaan tersebut untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Permasalahan lain yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah persentase dana yang digunakan untuk Belanja Modal belum mencapai 30 Persen sesuai ketentuan Pedoman Penyusunan APBD yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Masih tingginya proporsi anggaran untuk belanja tidak langsung, seperti gaji pegawai, dari pada belanja langsung, baik berupa dana pelayanan publik atau dana investasi yang terkait langsung dengan tujuan organisasi, sehingga mengakibatkan rendahnya nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di mata masyarakat menurut Nur (2011). Kondisi ini sejalan dengan pendapat Halim (2014: 9) yang menyatakan

bahwa Belanja Pegawai yang porsinya terlalu tinggi dibandingkan Belanja Modal sebuah problematika yang sudah sering menjadi berita.

Hal ini dibuktikan dengan melihat realisasi penggunaan dana APBD untuk Belanja Pegawai pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 memiliki rata-rata sebesar 56 persen, sementara untuk realisasi Belanja Modal sebesar 17 persen dari anggaran APBD. Fakta tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Selain itu artikel yang di muat pada situs resmi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Rabu, 11 Desember 2013 menyatakan “Mayoritas dana transfer daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah digunakan untuk mensejahterakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini terlihat dari data yang diformulasi oleh *Institute for Development of Economics dan Finance (Indef)* bahwa pada tahun 2013, rata-rata Belanja Pegawai untuk pemerintah kabupaten/kota sebesar 49 persen. Padahal rata-rata Belanja Modalnya hanya 25,3 persen”. Pengelolaan keuangan dalam pemerintah adalah bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk pegawai. Oleh karena itu, efektivitas keuangan harus jelas, yaitu untuk kemakmuran masyarakat. Wujud nyata dalam bentuk daya beli masyarakat meningkat, masyarakat sudah banyak yang memperoleh pekerjaan dan mempunyai penghasilan, pelayanan yang baik dan sesuai dengan standar, serta masyarakat terjamin akan kesehatannya.

Fenomena yang termuat pada Jateng Pos (2015), menunjukkan bahwa sumber penerimaan dan transfer dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi tumpuan Belanja Modal untuk pembangunan di Jawa Tengah, hal tersebut dikarenakan minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah yang mengakibatkan Belanja Modal untuk pembiayaan pembangunan dan penambahan aset di Provinsi Jawa Tengah belum bisa terpenuhi, minimnya perhatian pemerintah dalam pengelolaan sumber-sumber dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor utama dalam kasus tersebut.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah diminta menggali potensi sumber pajak lain dan mengoptimalkan pencairan piutang pajak guna mendukung ketercapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengatakan realisasi Pendapatan Asli Daerah ini hanya mampu ini hanya mampu tercapai 90,36% dari target APBD. Rendahnya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah ini merupakan dampak dari kinerja dalam hal pemungutan Pajak Daerah. Pendapatan sektor pajak di Provinsi Jawa Tengah hanya terealisasi sebesar 86,48% dari target yang direncanakan. Tidak tercapainya target PAD disebabkan oleh gagalnya pendapatan target Pajak Daerah, khususnya Pajak Kendaraan bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kecenderungan rendahnya Pajak Daerah didorong oleh serapan PKB dan BBNKB yang terhitung masih rendah.

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi atau visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi baik sektor swasta maupun sektor publik yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Penilaian kinerja dapat dilihat dari dua aspek. Aspek pertama yaitu aspek yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan keuangan organisasi atau tertentu disebut dengan kinerja non keuangan (*non financial performance*). Aspek kedua yaitu aspek aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan organisasi atau instansi tertentu dikatakan sebagai Kinerja Keuangan (*financial performance*).

Kinerja Keuangan menurut Fahmi (2012: 2) adalah ukuran dari suatu usaha yang dilakukan untuk melihat sejauh mana organisasi atau instansi tertentu melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan sesuai aturan-aturan yang berlaku dengan baik dan benar. Sesuai dengan Peraturan Pasal 4 No. 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003, laporan keuangan yang harus di susun oleh pemerintah

daerah setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 keuangan haruslah relevan, handal dan dapat dipahami supaya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam prakteknya laporan keuangan daerah memiliki beberapa kendala yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas, selain itu adanya keterbatasan pemahaman akan keuangan daerah pada pemerintah daerah. Adanya kendala yang terdapat dalam penyusunan keuangan daerah maka perlu diadakannya penilaian terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan kinerja pemerintah daerahnya supaya dapat diketahui apakah pemerintah daerah tersebut telah menjalankan dengan baik atau belum.

Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan. Wood dalam penelitian Siti Nur Rochmah (2015) mengungkapkan bahwa fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai (1) Evaluasi bagaimana program tersebut berjalan; (2) Sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan; (3) Alat komunikasi dengan publik. Mardiasmo (2009: 121) menyatakan bahwa pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan

keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Perusahaan sektor publik (pemerintah daerah) berbeda jauh dengan swasta. Terdapat beberapa cara untuk metode dalam mengukur Kinerja Keuangan pada sektor publik (pemerintah daerah) diantaranya penilaian kinerja dengan metode *balanced scorecard*, *value for money*, *analytic hierarchy process* dan analisis rasio keuangan. Metode penilaian kinerja pada sektor publik tersebut tidak hanya digunakan untuk mengukur aspek finansial saja, namun juga aspek non finansial. Salah satu cara pengukuran/penilaian Kinerja Keuangan sektor publik yang berfokus pada aspek finansial untuk menilai pada pemerintah daerah adalah analisis rasio keuangan. Pada instansi pemerintah daerah, penilaian Kinerja Keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan dilakukan berdasarkan data laporan keuangan pada pemerintah daerah yaitu berupa pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan analisis rasio terhadap APBD. Hasil dari perhitungan analisis rasio yang dilakukan pada APBD, selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman pengukuran untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah suatu daerah dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan

pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya.

Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Selain berbasis anggaran, keuangan pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba (*profits* atau *net income*), meskipun ada sebutan surplus atau defisit untuk selisih antara pendapatan dan belanja. Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja, baik di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Jika anggaran/realisasi pendapatan lebih besar daripada anggaran/realisasi belanja, maka terjadi surplus, kalau sebaliknya maka terjadi defisit. Terdapat pemerintah daerah yang mengalami surplus dalam anggaran ataupun realisasi anggarannya, namun lebih banyak pemerintah daerah yang mengalami defisit. Namun, bukan berarti lebih sedikit pemerintah daerah yang kondisi keuangannya baik dibanding yang buruk, karena surplus/defisit bukanlah kunci utama baik buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama antara lain, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang menjadi poin penting tersebut, maka analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah penting untuk dilakukan. Beberapa



penelitian yang telah dilakukan secara umum hasilnya menyatakan bahwa informasi yang ada dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan dinyatakan dalam rasio keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Suprpto (2006) melakukan penelitian terkait Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman selama masa otonomi dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang diukur dengan menggunakan ketiga rasio tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rasio Kemandirian juga digunakan oleh Merynda Puspitaningrum (2015) sebagai pengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, selain Rasio Kemandirian juga menggunakan Rasio Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal.

Steven dan McGrowen dalam Ningsih (2010) melakukan penelitian terkait indikator keuangan dan tren keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan tiga variabel yang terdiri dari variabel pendapatan dan pengeluaran, variabel pajak dan *real estate*, dan variabel *composite* yang terbagi menjadi *debt to revenue ratio*, *grant to revenue ratio* serta *grant to expenditure ratio*. Hasil penelitian ini adalah bahwa tren keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh banyak faktor seperti jumlah penduduk dan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Cohen dalam penelitian Ningsih (2010) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menjadi moderator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Yunani

dengan menggunakan variabel *domestic product*, populasi penduduk, variabel *real estate*, *tourist* dan *capital*. Sementara indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan adalah rasio keuangan yang terbagi menjadi *return on equity*, *return on assets*, *profit margin*, *current ratio*, *debt/equity*, *long term liabilities/total assets*, *assets turnover*, *operatoring revenues/total reveueus* dan *operating reveueus/operating expense*. Hasil penelitian Cohen (2006) menyatakan bahwa kelima faktor yang terdiri dari *gross domestic product*, populasi penduduk, variabel *real estate*, *tourist* dan *capital* memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dinyatakan dalam Sembilan rasio keuangan. Rasio Profitabilitas yang dinyatakan dalam rasio *ROA*, *ROE*, dan *profit margin* tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut karena profitabilitas sektor publik pemerintah berbeda dengan sektor swasta.

Menurut Darise (2008 : 134), sumber pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain PAD yang sah, dimana masing-masing ini dapat menunjang kegiatan pemerintahan. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangannya, pemerintah daerah diharapkan mampu mencari sumber-sumber penerimaan keuangan sendiri khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang 33 Tahun 2004, disebutkan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertuang dalam APBD adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ,dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan *revenue* oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Pendapatan yang semakin meningkat diharapkan bisa memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Suatu pemerintah daerah mampu mencapai jumlah pendapatan daerah yang tinggi tentunya mempunyai jumlah kas tersedia yang cukup untuk melakukan pembiayaan kegiatan program kerja yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, dengan demikian akan tercipta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang baik.

Dana Perimbangan adalah sumber pendapatan lain daerah yang memiliki kontribusi besar pada struktur APBD. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyebutkan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan atau yang sering disebut dengan Dana Transfer ini mempunyai peranan yang penting terutama untuk mencapai

efisiensi dan keadilan dalam penyediaan layanan publik. Dana Perimbangan memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu dana yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menurun.

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang bisa disebut dengan *expenditure* yang terdiri belanja rutin atau belanja operasional pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Belanja tersebut dipergunakan untuk memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Semakin baik pelayanan publik yang diberikan, menunjukkan semakin baik pengelolaan pembelanjaan pemerintah daerah. Pengelolaan pembelanjaan yang baik menciptakan *value for money* yang baik, sehingga penilaian akan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menjadi baik pula.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh PAD, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan pada ringkasan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka penulis mengambil judul: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Tingkat Ketergantungan yang ditunjukkan dengan persentase Dana Perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat masih tinggi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah belum dapat mencapai 30 persen persentase Belanja Modal sesuai dengan peraturan Pemendagri.
3. Kurangnya usaha dalam pengelolaan serta pemungutan potensi Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki.
4. Adanya keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas dalam pemahaman keuangan daerah pada pemerintah daerah.
5. Diperlukannya pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah atas pencapaian dari pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu sebagai evaluasi berkala dan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat banyak faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, baik faktor Kinerja Keuangan (*financial performance*) dan kinerja non keuangan (*non financial performance*) oleh

karena itu, peneliti memfokuskan penelitian pada faktor Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2012-2016.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016?
2. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016?

## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016.
2. Mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016.
3. Mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016.
4. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan, ilmu dan acuan dalam menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

berdasarkan hasil perhitungan Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## 2. Manfaat Secara Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan terkait dengan hal bagaimana cara menghitung dan menganalisis laporan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam mengelola keuangan daerah dari tahun ke tahun.

### b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah masing-masing wilayah.

### c. Bagi pihak Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat dapat membantu pemerintah dengan ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan.



d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

###### **a. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja Keuangan merupakan ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Menurut Fahmi (2012: 2) yang dimaksud dengan Kinerja Keuangan adalah hasil atau ukuran suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi tertentu telah melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Pengertian Kinerja Keuangan menurut Jumingan (2006: 239) merupakan gambaran kondisi keuangan organisasi pada suatu periode tertentu yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Kinerja Keuangan dapat diartikan sebagai keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang sudah dicapai sehubungan dengan pengelolaan keuangan daerah melalui penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur sesuai dengan program yang telah ditentukan dan direncanakan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan

suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah (Mahsun, 2013: 25). Pendapat lainnya mengatakan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil dari kegiatan/program yang telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang ukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro, 2010). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil penilaian secara kuantitatif dari suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan pemerintah daerah. Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan agar kualitas sektor publik jauh lebih baik.

Menurut Halim (2004: 24) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil dari pengukuran untuk melihat kondisi keseluruhan ketercapaian pengelolaan keuangan atau pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Salah satu informasi

yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kinerja adalah informasi keuangan.

**b. Arti Penting Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja menurut Bastian (2009: 329) dalam Akuntansi Sektor Publik di Indonesia adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi dalam periode waktu tertentu. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan atau badan usaha yaitu (Bastian, 2009: 337):

- 1) Masukan (*inputs*), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya.
- 2) Indikator keluaran (*outputs*), yaitu segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik.
- 3) Indikator manfaat (*benefits*), yaitu segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- 4) Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif ataupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Bastian (2009: 339) juga menjelaskan bahwa indikator kinerja tersebut memiliki fungsi dan peranan dalam memperjelas apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, menciptakan *consensus* yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan dalam menilai kinerja. Fungsi lainnya adalah membangun dasar dari pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja. Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah juga mempunyai tujuan sebagai berikut: 1) mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, 2) menyediakan sarana pembelajaran pegawai, 3) memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya, 4) memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*), 5) memotivasi pegawai, 6) menciptakan akuntabilitas publik. Laporan Kinerja Keuangan menurut Darise (2008: 51) merupakan realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi serta surplus atau defisit. Oleh karena itu, penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan/pegawai berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.

**c. Tahap-tahap Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Fahmi (2012: 3), ada 5 (lima) tahap dalam menganalisis Kinerja Keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu:

1) Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan.

*Review* di sini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

2) Melakukan perhitungan

Penerapan metode perhitungan di sini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.

3) Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.

Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya.

4) Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami oleh perusahaan tersebut.

5) Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi untuk memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

Pada pemerintah daerah tahapan untuk menganalisis dan mengevaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara tepat dan komperhensif adalah:

- 1) Menyiapkan data-data anggaran dan laporan realisasi anggaran, yaitu data utama yang digunakan dalam analisis ini adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data anggaran memuat rencana-rencana penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja dan pembiayaan dalam satu periode.
- 2) Membandingkan data-data realisasi anggaran dengan anggarannya untuk setiap item yang sama. Item anggaran dibandingkan dengan item realisasi baik pada pos pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Untuk memperoleh hasil yang objektif dan akuntabel, laporan realisasi anggaran harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan memadai.
- 3) Menghitung selisih dari anggaran. Perbandingan anggaran dengan realisasinya menghasilkan selisih atau penyimpangan (*variance*). Selisih ini dikelompokkan menjadi dua yaitu selisih penerimaan dan selisih pengeluaran sehingga dapat diketahui selisih lebih (surplus) atau selisih kurang (defisit) anggaran.

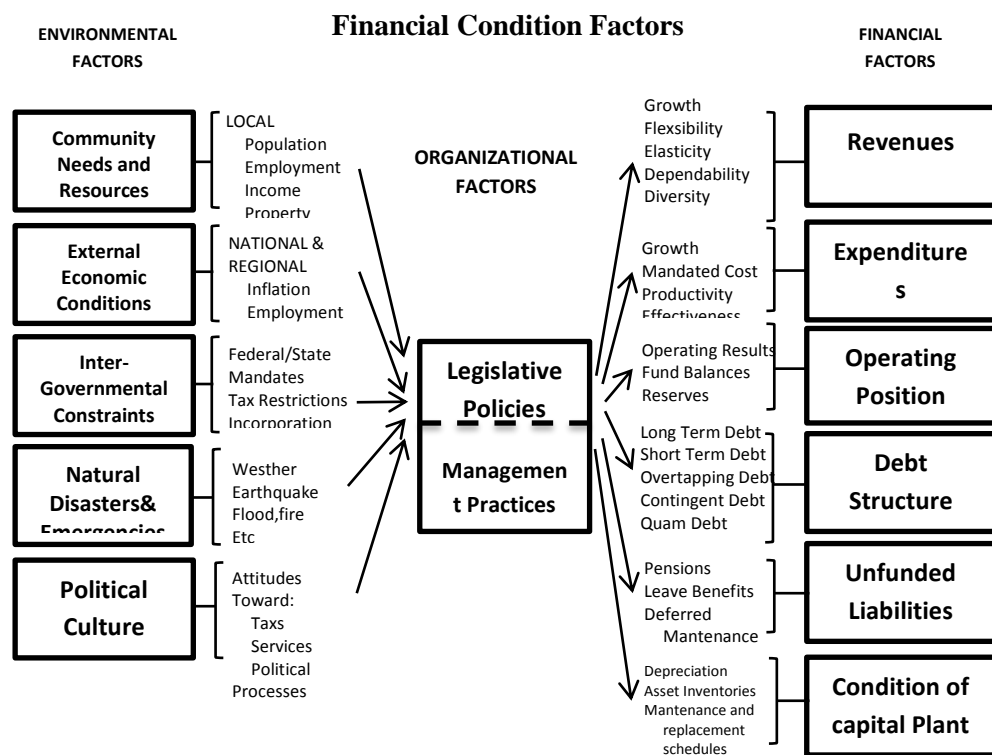
- 4) Menghitung persentase tingkat keberhasilan anggaran. Nilai selisih anggaran yang terjadi dapat dihitung persentase ketercapaiannya. Penghitungan persentase ketercapaian ini dilakukan pada pos-pos penerimaan maupun pengeluaran.
- 5) Melakukan *analytical procedure* dengan membuat rasio-rasio kinerja. Untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang kinerja organisasi, maka analisis bisa diteruskan dengan melakukan penghitungan rasio-rasio anggaran, misalnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.

**d. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Groves et al, dalam Ningsih (2010) menyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terbagi atas: faktor keuangan (*financial factors*) dan faktor lingkungan (*environmental factors*) yang diantara keduanya tidak terlepas dari organisasional (*organizational factor*). Faktor keuangan (*financial factors*) terdiri atas *revenue, expenditure, operating position, debt structure, unfunded liabilities, dan condition of capital fund* yang masing-masing dari variabel tersebut terbagi lagi atas sub variabel yang memengaruhi di dalamnya. Faktor lingkungan (*environmental*



factors) yang juga memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas *community need and resources, external economic conditions, inter-governmental constrains, natural disaster and emergencies, dan political cultures*. Faktor organisasional (*organizational factors*) yaitu terdiri dari kebijakan legislatif dan praktik manajemen. Hasil yang diperoleh dalam penelitian Groves (2001) menyatakan bahwa indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh baik faktor keuangan, faktor lingkungan maupun faktor organisasional yang dapat di *monitoring* melalui *Financial Trend Monitoring System (FTMS)*. Pada penelitian Groves et all (2001) memperlihatkan gambar yang di dalamnya berisi faktor-faktor kinerja finansial.



**Gambar 1. Financial Condition Factors**

Tiap-tiap faktor diklasifikasi menjadi faktor lingkungan, faktor organisasional dan faktor finansial. Gambar di atas disusun sedemikian rupa sehingga masing-masing faktor menjadi input dan output antara satu dan yang lainnya. Tipe hubungan seperti ini tidak hanya berlaku pada satu jalur saja. Pada intinya, faktor lingkungan yang merepresentasikan pengaruh eksternal pada pemerintah daerah keseluruhannya disaring dan menjadi faktor organisasional. Hasilnya adalah serangkaian faktor finansial menggambarkan struktur internal finansial pemerintahan.

Penelitian Patriati (2010) juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah, antara lain *revenue*, *expenditure*, *real estate*, *capital*, *taxes*, *grant*, *population*, dan *tourist*. Berdasarkan penelitian tersebut, dalam penelitian ini menggunakan beberapa faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu *revenue* dan *expenditure*. *Revenue* merupakan pendapatan pemerintah daerah yang digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah. Pendapatan daerah berasal dari dua sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan dari transfer pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. *Expenditure* merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu periode tertentu. *Expenditure* dalam pemerintah dinamakan sebagai belanja. Belanja dibedakan menjadi belanja pembangunan dan belanja rutin. Selain itu,

belanja pemerintah juga diklasifikasikan sebagai belanja operasional dan Belanja Modal.

Penelitian Siti Nur Rochmah (2015) juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan *study* empiris pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2012 antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Legislatif, dan *Leverage*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut penelitian ini menggunakan beberapa faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

**e. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah menurut Mahsun (2013: 196). Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi:

1) Indikator Masukan (*Inputs*)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya: jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

2) Indikator Proses (*Process*)

Indikator proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya: ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

3) Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya: jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

4) Indikator Hasil (*Outcome*)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya: tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

5) Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

#### 6) Indikator Dampak (*Impact*)

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

#### f. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo (2009: 121), “Pengukuran kinerja pada sektor publik (instansi pemerintah daerah) adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial”. Menurut Mahsun (2013: 25), “Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan”. Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu penilaian untuk mengetahui pencapaian kinerja suatu organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system* (sistem penghargaan dan hukuman).

Menurut Mardiasmo (2009: 123) penilaian Kinerja Keuangan diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut menganalisis varian (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varian secara garis besar

berfokus pada (a) varian pendapatan (*revenue variance*) dan (b) varians pengeluaran (*expenditure variance*) yang terdiri atas varian belanja rutin (*recurrent expenditure variance*), dan varian belanja investasi /modal (*capital expenditure variance*).

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2009:121):

- 1) Memperbaiki Kinerja Pemerintah Daerah.
- 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya digunakan untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah. Menurut Halim (2007) mengemukakan bahwa pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan pemerintahan, membangun, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintahan daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan perhitungan rasio-rasio keuangan daerah. Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi organisasi yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan *trend* pola perubahan tersebut (Fahmi, 2012: 45). Analisis rasio keuangan pada pemerintah dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur dalam laporan keuangan pada suatu periode tertentu sehingga diketahui kecenderungan yang terjadi. Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur atau indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini dari penelitian terdahulu yang dilakukan Merynda Puspitaningrum (2014) menggunakan tiga rasio, yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Berikut ini adalah ketiga rasio pengukuran kinerja dan cara menghitungnya:

#### 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007: 232). Menurut Mahmudi (2016: 140) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menurut Mahmudi (2016: 140) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} \times 100\%}{\text{Transfer pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}}$$

Berdasarkan rumus di atas dapat diketahui bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi Rasio Kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi



rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

## 2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Rumus perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menurut Mahmudi (2016: 140) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

## 3) Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal menunjukkan tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat, yaitu ditunjukkan dengan melihat perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total Penerimaan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan

desentralisasi. Berdasarkan Rasio Desentralisasi Fiskal dapat diketahui bagaimana pemerintah daerah memaksimalkan PAD sebagai sumber pendapatan terbesar bagi daerah. Rumus perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal menurut Mahmudi (2016: 140) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

## **2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2007: 96), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap

tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan ( Darise, 2008 :25).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di suatu daerah berdasarkan peraturan daerah dan Undang-Undang yang berlaku di mana Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

#### **b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26, kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari empat yaitu:

##### 1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2010:9). Mardiasmo (2011: 6) berpendapat bahwa” Pajak daerah adalah pajak yang dipungut

oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah”.

Menurut Resmi (2011:8) “Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun pajak II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”. Berdasarkan tiga pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari:

a) Pajak Provinsi

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan Air

b) Pajak Daerah Kabupaten

- (1) Pajak Hotel
- (2) Pajak Restoran
- (3) Pajak Reklame
- (4) Pajak Hiburan

- (5) Pajak Penerangan Jalan
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- (7) Pajak Parkir
- (8) Pajak Air Tanah
- (9) Pajak Sarang Burung Walet
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

## 2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang Pendapatan Asli Daerah kedua setelah pajak daerah, bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah. Dalam istilah asing retribusi disebut sebagai *user charge*, *user face*, atau *charging for service*. Retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan (kontraprestasi) langsung yang dinikmati pembayar retribusi.

## 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan

modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain:

- (a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- (b) Jasa giro
- (c) Pendapatan bunga
- (d) Tuntutan ganti rugi
- (e) Komisi
- (f) Potongan
- (g) Keuntungan selisih kurs
- (h) Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- (i) Pendapatan denda pajak dan retribusi
- (j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- (k) Pendapatan atas fasilitas sosial dan fasilitas umum
- (l) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

**3. Dana Perimbangan**

**a. Pengertian Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah (Darise, 2008:137). Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Disebutkan bahwa: “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi”.

Menurut Djaenuri (2012) “Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah. Sejalan dengan tujuan pokoknya, Dana Perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembayaran yang adil, proposional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (*akuntabel*), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

## **b. Pembagian Dana Perimbangan**

Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas:

### **1) Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil atau dana bagian daerah terdiri atas.

- a) Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.
- b) Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Penerimaan negara dari bea perolehan atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah, dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah provinsi.
  - (2) 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil, dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/kota.



c) Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

## 2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang penggunaannya diserahkan kepada daerah. Menurut Darise (2008), Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah. Fungsi Dana Alokasi Umum adalah sebagai pemerataan kapasitas fiskal. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan sumber daya dengan mempertimbangkan kemampuan setiap daerah dan kebutuhannya. Prinsip Dana Alokasi Umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil akan

memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya jika suatu daerah potensi fiskalnya kecil sementara kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar.

### 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang menjadi sumber pendapatan daerah. Dasar hukum yang mengatur Dana Alokasi khusus adalah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional untuk membantu mendanai kegiatan khusus dan mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pelayanan dasar masyarakat meliputi pendidikan, infrastruktur dan prasarana pemerintah daerah.

## **4. Belanja Modal**

### **a. Pengertian Belanja Modal**

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 Tentang Bagan Akun Standar menyebutkan Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Menurut Halim (2007: 101) “Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Menurut Mardiasmo (2009: 67) “Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaanya”.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Belanja Modal adalah:

Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Berdasarkan pendapat mengenai pengertian Belanja Modal di atas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas *public service*.

**b. Peran Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah dimana dijadikan salah satu indikator produktifitas dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap dan aset lainnya baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk meningkatkan fasilitas publik. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 menyatakan bahwa Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Setiap tahun biasanya dilaksanakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

**c. Jenis-jenis Belanja Modal**

Belanja Modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dimana peraturan tersebut sudah diperbaharui dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pertambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan pembangunan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan serta perawatan terhadap fisik

lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi serta jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah Belanja Modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

## **B. Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

### **1. Penelitian Ayu Tutia Ningsih (2010)**

Penelitian Ayu Tutia Ningsih tahun 2010 berjudul Analisis Faktor Keuangan dan Faktor Lingkungan yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (*Study* kasus pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengungkapan dari laporan keuangan daerah yang diwakili oleh *Revenue*, *Expenditure*, *Pajak*, *Real Estate*, *Grant*, *Capital*, *GDP (Gross Domestic Product)*, sebagai faktor keuangan dan *Employment* sebagai faktor lingkungan semua variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan dan secara parsial variabel *Revenue (PAD)*, *Expenditure* dan *Employment* yang berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Perbedaan dari penelitian Ayu Tutia Ningsih dengan peneliti adalah dalam menggunakan variabel independen (variabel bebas) dan periode

waktu penelitian yang digunakan. Penelitian Ayu Tutia Ningsih menggunakan variabel independen yaitu *Revenue*, *Expenditure*, Pajak, *Real Estate*, *Capital*, *Grant*, *GDP (Gross Domestic Product)* dan *Employment* sementara peneliti menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal sebagai variabel independen. Periode waktu penelitian pada penelitian Ayu Tutia Ningsih adalah 2 (dua) tahun yaitu dari 2005-2007, sementara periode waktu penelitian peneliti adalah 5 (lima) tahun yaitu dari 2012-2016. Persamaan antara penelitian Ayu Tutia Ningsih dengan penelitian peneliti adalah dalam penggunaan variabel dependen (terikat) dan objek penelitian. Dalam kedua penelitian tersebut menggunakan variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sementara objek penelitian yang digunakan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

## **2. Penelitian Ebit Julitawati, Darwanis, Jalaluddin (2012)**

Penelitian Ebit Julitawati, Darwanis, Jalaluddin tahun 2012 berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.



Perbedaan dari penelitian Ebit Julitawati, Darwanis, Jalaluddin dengan peneliti adalah objek penelitian dan periode waktu penelitian yang digunakan. Penelitian Ebit Julitawati, Darwanis, Jalaluddin objek penelitiannya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, sementara objek penelitian peneliti adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Periode waktu penelitian pada penelitian Ebit Julitawati, Darwanis, Jalaluddin adalah 3 (tiga) tahun yaitu dari 2009-2011, sementara periode waktu penelitian peneliti adalah 5 (lima) tahun yaitu dari 2012-2016.

Persamaan antara penelitian Ebit Julitawati, Darwanis, Jalaluddin dengan penelitian peneliti adalah dalam penggunaan menggunakan variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (terikat). Dalam kedua penelitian tersebut menggunakan variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sementara untuk variabel independen (variabel bebas) memiliki kesamaan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan.

### **3. Penelitian Estetika Mutiaranisa Kurniawati (2015)**

Penelitian Estetika Mutiaranisa Kurniawati tahun 2015 berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Daerah Otonom Baru di Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hasil regresi berganda Pendapatan Asli Daerah,

Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah pada Daerah Otonom Baru di Indonesia. Dan secara Parsial, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, sedangkan Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah pada Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia.

Perbedaan dari penelitian Estetika Mutiaranisa Kurniawati dengan peneliti adalah dalam penggunaan variabel independen (variabel bebas) dan pengambilan populasi penelitian. Penelitian Estetika Mutiaranisa Kurniawati menggunakan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, PDRB, dan IPM, sementara peneliti menggunakan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal. Pengambilan populasi penelitian pada Estetika Mutiaranisa Kurniawati adalah pada Daerah Otonom Baru di Indonesia, sementara peneliti mengambil populasi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

#### **4. Penelitian Fajar Nugroho dan Abdul Rohman (2012)**

Penelitian Fajar Nugroho dan Abdul Rohman tahun 2012 berjudul Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel *Intervening* (*Study Kasus di Provinsi Jawa Tengah*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara langsung, sedangkan secara tidak langsung Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel *intervening*.

Perbedaan dari penelitian Fajar Nugroho dengan peneliti adalah dalam penggunaan variabel *intervening* pada penelitian Fajar Nugroho yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dijadikan variabel *intrevening* sedangkan peneliti tidak menggunakannya. Periode waktu penelitian pada penelitian Fajar Nugroho adalah 3 (tiga) tahun yaitu dari 2008-2010, sementara periode waktu penelitian peneliti adalah 5 (lima) tahun yaitu dari 2012-2016. Persamaan antara penelitian Fajar Nugroho dengan penelitian adalah objek penelitian yang digunakan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

##### **5. Penelitian Merynda Puspitaningrum (2015)**

Penelitian Merynda Puspitaningrum tahun 2015 berjudul Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi DIY dengan Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai variabel *Intervening*. Penelitian ini menggunakan tiga rasio keuangan untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan, dan Rasio Desentralisasi

dengan menggunakan tiga rasio tersebut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Sektor Pariwisata berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, tetapi Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak memberikan pengaruh *intervening* hubungan pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Perbedaan dari penelitian Merynda Puspitaningrum dengan peneliti adalah menggunakan variabel *intervening* dan tempat penelitian yang digunakan. Penelitian Merynda Puspitaningrum menggunakan variabel *intervening* yaitu pertumbuhan usaha kecil menengah (UKM), sementara peneliti tidak menggunakannya. Objek penelitian yang digunakan adalah Pemerintah Daerah di Provinsi DIY, sementara peneliti menggunakan objek penelitian Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

#### **6. Penelitian Ratri Patriati (2010)**

Penelitian Ratri Patriati tahun 2010 berjudul Analisis Faktor-faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Revenue* dan *Expenditure* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Namun demikian, *Real Estate*, *Capital*, *Taxes*, *Grant*, *Population* dan *Tourist* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jumlah *Revenue*

dan *Expenditure* merupakan faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah.

Perbedaan dari penelitian Ratri Patriati dengan peneliti adalah dalam menggunakan variabel independen (variabel bebas) dan periode waktu penelitian yang digunakan. Penelitian Ratri Patriati menggunakan variabel independen yaitu *Revenue, Expenditure, Real Estate, Capital, Taxes, Grant, Tourist, dan Population* sementara peneliti menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal sebagai variabel independen. Periode waktu penelitian pada penelitian Ratri Patriati adalah 2 (dua) tahun yaitu dari 2005-2007, sementara periode waktu penelitian peneliti adalah 5 (lima) tahun yaitu dari 2012-2016. Persamaan antara penelitian Ratri Patriati dengan penelitian peneliti adalah dalam penggunaan variabel dependen (terikat) dan tempat penelitian. Dalam kedua penelitian tersebut menggunakan variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sementara objek penelitian yang digunakan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

#### **7. Penelitian Siti Nur Rochmah (2015)**

Penelitian Siti Nur Rochmah tahun 2015 berjudul Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi empiris pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah 2009-2012). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Legislatif, dan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Perbedaan dari penelitian Siti Nur Rochmah dengan peneliti adalah dalam menggunakan variabel independen (variabel bebas) dan periode waktu penelitian yang digunakan. Penelitian Siti Nur Rochmah menggunakan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Legislatif, dan *Leverage*, sementara peneliti menggunakan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal sebagai variabel independen. Periode waktu penelitian pada penelitian Siti Nur Rochmah adalah 4 (empat) tahun yaitu dari 2009-2011, sementara periode waktu penelitian peneliti adalah 5 (lima) tahun yaitu dari 2012-2016.

Persamaan antara penelitian Siti Nur Rochmah dengan penelitian peneliti adalah dalam penggunaan variabel dependen (terikat) dan tempat penelitian. Dalam kedua penelitian tersebut menggunakan variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sementara objek penelitian yang digunakan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

### **C. Kerangka Berpikir**

#### **1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di suatu daerah berdasarkan peraturan daerah dan Undang-Undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi kebutuhannya, dan memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan Pendapatan Asli Daerah sangat menentukan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Adanya potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Semakin besar kontribusi Pendapatan

Asli Daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat maka dapat dikatakan ada peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah naik maka dapat dikatakan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota naik (meningkat).

## **2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah. Dana Perimbangan yang meliputi terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah.

Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat digunakan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horizontal yaitu kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, hal ini bergantung kondisi daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan daerah yang memiliki sumber daya alam atau tidak, daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah, serta adanya kewajiban untuk pemerintah daerah menjaga tercapainya standar



pelayanan minimum di setiap daerah. Daerah yang sumber daya yang sedikit memerlukan subsidi agar dapat mencapai standar pelayanan minimum itu. Oleh karena itu Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

### **3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016**

Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara, yang tercermin di dalam Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja Modal yang besar merupakan cerminan banyaknya infratraktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang dihasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak.

Perkembangan pesat pembangunan dan penambahan aset diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan serta meningkatkan modal bagi kinerja

pemerintah daerah yang berdampak pada semakin meningkatnya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Peningkatan capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dari satu periode anggaran ke periode anggaran berikutnya.

#### **4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016**

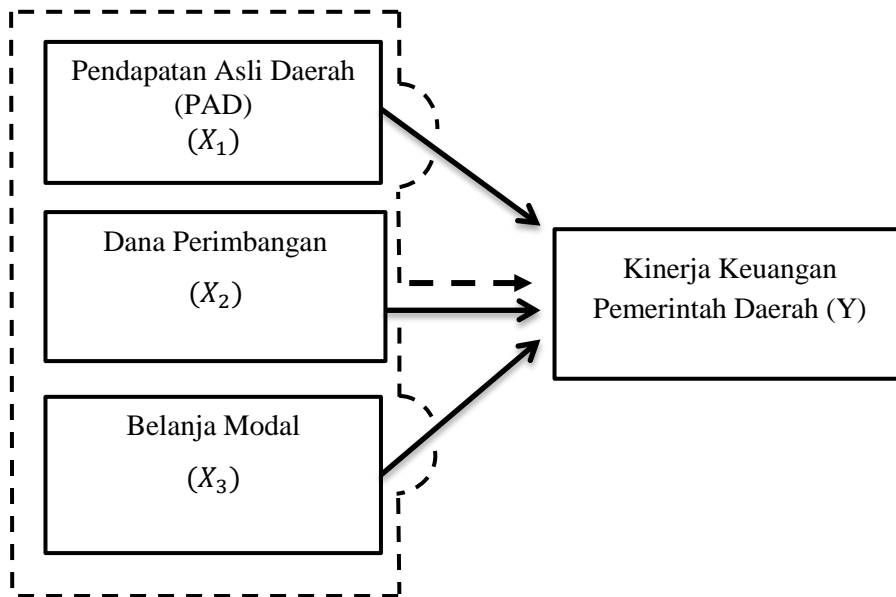
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama adalah *Revenue* yang merupakan pendapatan pemerintah daerah yang digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, pendapatan daerah berasal dari dua sumber yaitu: Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan dari transfer pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Apabila semakin tinggi jumlah pendapatan daerah, maka semakin besar dana yang tersedia bagi pembangunan daerah sehingga pemerintah daerah bersangkutan mampu menyediakan pelayanan jasa kepada masyarakat yang lebih baik. Jumlah pendapatan pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kekuatan keuangan pemerintah daerah sehingga mampu memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah daerah.

Faktor kedua adalah *Expenditure* yang merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, belanja dibedakan menjadi belanja pembangunan dan belanja rutin. Selain itu, belanja pemerintah juga diklasifikasikan sebagai belanja operasional dan Belanja Modal. Jumlah Belanja Modal berpengaruh pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Semakin besar atau tinggi jumlah Belanja Modal pemerintah daerah mengindikasikan bahwa pertumbuhan pembangunan pemerintah daerah tinggi sehingga ada upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakat.

#### D. Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka dapat disusun paradigma penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2. Paradigma Penelitian**

Keterangan:

$X_1$  = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$X_2$  = Dana Perimbangan

$X_3$  = Belanja Modal

$Y$  = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

————→ = Pengaruh  $X_1, X_2, X_3$  secara sendiri-sendiri terhadap  $Y$

- - - -> = Pengaruh  $X_1, X_2, X_3$  secara bersama-sama terhadap  $Y$

## **E. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian paradigma, peneliti dapat menarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016.
2. Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016.
3. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif karena dalam penelitian ini banyak menggunakan angka-angka dan analisis yang dilakukan menggunakan statistik. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian *ex post facto*, yaitu penelitian yang bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas secara keseluruhan sudah terjadi (Widarto, 2013).

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Sesuai dengan judul yang diambil yaitu “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016” maka penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Periode yang diambil dalam penelitian ini adalah mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Data penelitian diperoleh dari resmi situs Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2017- Januari 2018.

### **C. Subjek Penelitian**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (1989: 862) yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Subjek penelitian adalah merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta di lapangan. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota.

### **D. Definisi Operasional Variabel**

#### **1. Variabel Terikat (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah)**

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan hasil atau ukuran suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi pemerintah telah melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tersebut diprosikan dengan menggunakan tiga rasio keuangan pemerintah daerah, agar dalam pengambilan kesimpulan tidak bias maka tiga rasio keuangan tersebut digunakan. Ketiga rasio yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa rasio-rasio tersebut menggunakan unsur yang berkaitan dengan variabel independen penelitian. Ketiga rasio tersebut dijumlahkan sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan

oleh Merynda Puspitaningrum untuk memperoleh data Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun ketiga rasio keuangan sebagai gambaran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tersebut adalah:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} \times 100\%}{\text{Transfer pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}}$$

Sumber : Mahmudi, 2016 : 140

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Sumber : Mahmudi, 2016 : 140

c. Rasio Desentralisasi Fiskal

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Sumber : Mahmudi, 2016 : 140

d. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

$$\text{Kinerja Keuangan Pemda} = \text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} + \text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} + \text{Rasio Desentralisasi Fiskal}$$



## 2. Variabel Bebas (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal)

### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang sumbernya dari daerah tersebut. Pemungutannya didasari oleh peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cakupannya yaitu terdiri dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Perhitungan rumusnya yaitu:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah}$$

(Dalam penelitian ini PAD di ambil dari data realisasi PAD tanpa menghitung sendiri)

### b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Perhitungan rumusnya yaitu:

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Bagi Hasil (DBH)} + \text{Dana Alokasi Umum (DAU)} + \text{Dana Alokasi Khusus (DAK)}$$

(Dalam penelitian ini Dana Perimbangan di ambil dari data realisasi Dana Perimbangan tanpa menghitung sendiri)

### c. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas *public service*. Perhitungan rumusnya yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} &= \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} \\ &+ \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja} \\ &\text{Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Lainnya} \end{aligned}$$

(Dalam penelitian ini Belanja Modal di ambil dari data realisasi Belanja Modal tanpa menghitung sendiri)

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat, menggandakan, *mengcopy*, membaca, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 sampai dengan 2016. Data diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)).

## **F. Teknik Analisis Data**

### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, *varians*, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (Ghozali, 2011: 19).

### **2. Uji Asumsi Klasik**

#### **1) Uji Multikolinieritas**

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2011:105). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari besarnya nilai *Tolerance* dan *VIF*-nya (*Variance Inflation Factor*). Regresi bebas dari masalah Multikolinieritas jika nilai *Tolerance* lebih dari 10 persen (0,10) dan nilai *VIF* kurang dari 10,00 (Ghozali, 2011:106).

#### **2) Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$ . Model regresi yang baik, tidak terjadi autokorelasi. Autokorelasi dalam regresi linier dapat

mengganggu suatu model, dimana akan menyebabkan terjadinya kebiasaan pada kesimpulan yang diambil. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, diantaranya melalui uji *Durbin Watson (DW-Test)*. Uji *Durbin Watson (DW test)* akan didapatkan nilai *DW* hitung (*d*) dan nilai *DW* tabel (*dL* dan *dU*). Tingkat signifikansi yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebesar 5%. Ghozali (2011:111) menyatakan bahwa untuk mengetahui ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji *Durbin Watson (DW-Test)* dengan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 1. Panduan Pengambilan Keputusan *DW Test***

<b>Hipotesis Nol</b>	<b>Keputusan</b>	<b>Jika</b>
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dL$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No Desicison</i>	$0 \leq d \leq dU$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dU < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	<i>No Desicison</i>	$4 - dU \leq d \leq 4 - dL$
Tidak ada autokorelasi positif dan negatif	Tidak ditolak	$dU < d < 4 - dU$

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model

regresi yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011:139). Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas menggunakan uji *White Test* yaitu dengan cara membandingkan nilai *Chi-Square* hitung ( $R\text{-Square} \times \text{Jumlah Observasi}$ ), dengan *Chi-Square* tabel dengan ketentuan *degree of freedom* (derajat kebebasan) sesuai dengan jumlah variabel bebas (independen) model penelitian, sedangkan signifikansinya adalah pada 0,05 sehingga dapat diketahui apakah asumsi homogenitas terpenuhi atau tidak. Apabila hasil *Chi-Square* hitung lebih kecil dari ( $<$ ) *Chi-Square* tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model penelitian. Sedangkan apabila hasil *Chi-Square* hitung lebih besar dari ( $>$ ) *Chi-Square* tabel, maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian mengalami heteroskedastisitas.

### **3. Pengujian Hipotesis**

#### **a. Analisis Regresi Linier Sederhana**

Analisis Regresi Linier Sederhana untuk Hipotesis Pertama, Kedua, dan Ketiga. Menurut Priyatno (2013: 123), analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel bebas (X) dengan satu variabel terikat (Y) yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Selain itu, analisis regresi linier juga bertujuan untuk memprediksikan nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan serta untuk mengetahui arah hubungan.

1) Menentukan Garis Linier Sederhana

Rumus regresi linier sederhana adalah sebagai berikut (Sujarweni dan Endaryanto, 2012: 83):

$$Y = \alpha + bX$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

X = Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, atau Belanja Modal

$\alpha$  = Nilai konstanta

b = Koefisien regresi

Berdasarkan rumus di atas, maka persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1$$

$$Y = \alpha + b_2X_2$$

$$Y = \alpha + b_3X_3$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

$\alpha$  = Nilai konstanta

$b_1b_2b_3$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Pendapatan Asli Daerah

$X_2$  = Dana Perimbangan

$X_3$  = Belanja Modal

- 2) Mencari koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) antara prediktor X dengan kriterium Y menggunakan rumus:

$$r_{xy} = \frac{\sum \{(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})\}}{\sqrt{\sum(X - \bar{X})^2 \sum(Y - \bar{Y})^2}}$$

(Irianto, 2009: 136)

- 3) Mencari koefisien determinasi ( $r^2$ ) antara prediktor  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$  dengan Y adalah sebagai berikut (Hadi, 2004: 22):

$$(r^2_{x_1y}) = \frac{\alpha_1 \Sigma X_1 Y}{\Sigma Y^2}$$

$$(r^2_{x_2y}) = \frac{\alpha_2 \Sigma X_2 Y}{\Sigma Y^2}$$

$$(r^2_{x_3y}) = \frac{\alpha_3 \Sigma X_3 Y}{\Sigma Y^2}$$

Keterangan:

$(r^2_{x_1y})$  = Koefisien determinasi antara  $X_1$  dengan Y

$(r^2_{x_2y})$  = Koefisien determinasi antara  $X_2$  dengan Y

$(r^2_{x_3y})$  = Koefisien determinasi antara  $X_3$  dengan Y

$\alpha_1$  = Koefisien prediktor  $X_1$

$\alpha_2$  = Koefisien prediktor  $X_2$

$\alpha_3$  = Koefisien prediktor  $X_3$

$\Sigma X_1 Y$  = Jumlah produk  $X_1$  dengan Y

$\Sigma X_2 Y$  = Jumlah produk  $X_2$  dengan Y

$\Sigma X_3 Y$  = Jumlah produk  $X_3$  dengan Y

$\Sigma Y^2$  = Jumlah kuadrat kriteria Y

Pengujian koefisien determinasi ( $r^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $r^2$  yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas, sementara nilai yang mendekati satu berarti bahwa variabel-variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

4) Pengujian signifikansi koefisien korelasi dengan uji t

Menurut Widarjono (2010:19) uji signifikansi (*significant test*) pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu dilakukan melalui uji t. Dalam hal ini berarti untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal) secara parsial atau individual terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah) dilakukan dengan menggunakan uji t (*t-test*). Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi pada tabel uji t dengan nilai alpha ( $\alpha$ ) yang telah ditentukan  $\alpha$  merupakan probabilitas menolak hipotesis yang benar. Semakin kecil  $\alpha$  berarti semakin kecil probabilitas menolak hipotesis yang benar dan semakin besar  $\alpha$  berarti semakin besar probabilitas



menolak hipotesis yang benar. Dalam praktiknya,  $\alpha$  biasanya ditentukan secara arbiter, yaitu 1 %, 5%, dan maksimal 10 % (Widarjono, 2010:28). Rumus yang digunakan untuk melakukan uji signifikansi (uji t) adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan

t =  $t_{hitung}$

r = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

$r^2$  = Kuadrat koefisien korelasi antara variabel X dan Y

n = jumlah sampel

(Sugiyono, 2015: 230)

Pengujian ini pada dasarnya untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independen akan berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai  $t_{hitung}$  selanjutnya dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5% (taraf kepercayaan 95%), apabila  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  berarti ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Sebaliknya apabila  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  berarti tidak ada pengaruh signifikansi antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Selain itu, hipotesis 1, 2, 3, dan 4 pada penelitian ini juga didukung apabila nilai signifikansi lebih kecil dari pada *level of significant*

( $sig. < \alpha$ ) berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual. Tetapi apabila nilai signifikansi lebih besar dari *level of significant* ( $sig. > \alpha$ ) berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual.

## b. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua variabel atau lebih variabel independen sebagai faktor *predictor* dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Analisis ini dilakukan jika variabel independennya minimal dua yang dimasukkan dalam model regresi ini (Sugiyono, 2015: 275).

### 1) Persamaan regresi linier berganda

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Variabel Dependen)

a = konstanta

$b_1b_2b_3$  = koefisien regresi model

$X_1$  = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$X_2$  = Dana Perimbangan

$X_3$  = Belanja Modal

$\epsilon$  = *error term model* (variabel residual)

(Sugiyono, 2015: 275)

2) Menentukan koefisien korelasi regresi linier berganda ( $R_{Y(1,2,3)}$ )

Persamaan dari koefisien korelasi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$R_{Y(1,2,3)} = \frac{b_1 \sum X_1 Y + b_2 \sum X_2 Y + b_3 \sum X_3 Y}{\sum Y^2}$$

Keterangan:

$R_{Y(1,2,3)}$  = Koefisien korelasi regresi berganda dengan tiga variabel independen.

$b_1$  = Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah

$b_2$  = Koefisien regresi variabel Dana Perimbangan

$b_3$  = Koefisien korelasi variabel Belanja Modal

$X_1$  = Variabel Pendapatan Asli Daerah

$X_2$  = Variabel Dana Perimbangan

$X_3$  = Variabel Belanja Modal

$Y$  = Variabel dependen

(Sugiyono, 2012:286)

3) Menentukan koefisien determinasi regresi linier berganda ( $R^2_{Y(1,2,3)}$ )

Koefisien determinasi regresi linier berganda ( $R^2_{Y(1,2,3)}$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi dapat menginterpretasikan sejauh mana keeratan hubungan antara linier berganda merupakan kuadrat dari koefisien korelasi berganda.

Analisis regresi linear berganda menggunakan koefisien determinasi ( $R^2_{Y(1,2,3)}$ ) untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model regresi dalam menerangkan setiap variabel independen. Nilai koefisien determinasi ( $R^2_{y(1,2,3)}$ ) terletak antara 0 dan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Jika nilai koefisien determinasi atau ( $R^2_{y(1,2,3)}$ ) semakin mendekati 1 maka garis regresi atau persamaan regresi semakin baik dan jika nilai koefisien determinasi semakin mendekati 0 maka garis regresi atau persamaan regresi semakin kurang baik (Widarjono, 2010: 20). Semakin tinggi koefisien determinasi maka akan semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin kecil nilai koefisien determinasi berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan keterikatannya dengan variabel dependen terbatas. Jika nilai koefisien determinasi mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

4) Menguji signifikansi regresi berganda menggunakan uji F

Widarjono (2010: 19) menjelaskan bahwa untuk uji signifikansi pengaruh semua variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen dilakukan dengan uji F. Dalam hal ini berarti untuk menguji signifikansi variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah) dilakukan dengan uji F.

Supriyadi (2014:58) menjelaskan bahwa untuk menguji signifikansi seluruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan melihat nilai signifikan dengan uji F pada tabel ANOVA dan membandingkan dengan nilai alpha ( $\alpha$ ) yang ditentukan (umumnya nilai  $\alpha$  yang digunakan 0,01; 0,05; 0,10). Persamaan yang digunakan dalam pengujian signifikansi dalam analisis regresi linier berganda (uji F) adalah:

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

$F_{hitung}$  = Harga F garis regresi

k = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah sampel

$R^2$  = koefisien determinasi regresi berganda

( Sugiyono, 2015: 235)

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi regresi berganda  $R^2$ . Hasil perhitungan tersebut kemudian dilihat dengan tabel pada taraf signifikansi 5%. Apabila  $F_{hitung}$  lebih besar daripada  $F_{tabel}$  dengan signifikansi 5% maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila  $F_{hitung}$  lebih kecil daripada  $F_{tabel}$  maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengambilan kesimpulan  $H_0$  signifikan

atau tidak ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a) Tingkat sig  $F < \alpha = 0,05$  maka Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah).
- b) Tingkat sig  $F > \alpha = 0,05$  maka Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Data Umum**

###### **a. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Jawa Tengah**

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Provinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua Provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Letaknya antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan: Laut Jawa
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan: Provinsi Jawa Timur
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan: Provinsi Jawa Barat

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,25 juta hektar (32,544,12 km<sup>2</sup>) atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa serta 1,70 persen dari luas Indonesia. Provinsi Jawa Tengah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Menurut Stasiun Klimatologi Kelas 1 Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 berkisar antara 18<sup>0</sup>C sampai 28<sup>0</sup>C. Tempat-tempat yang letaknya

dekat pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi dan kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 73 persen sampai 94 persen.

Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah administrasi yang terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota yang terdapat 573 kecamatan, 750 kelurahan, dan 8.809 desa dimana ibukota di Kota Semarang. Kabupaten yang memiliki wilayah terluas adalah Kabupaten Cilacap dengan luas wilayah sebesar 2.138,51 km<sup>2</sup>, sedangkan kabupaten yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kabupaten Kudus dengan luas wilayah sebesar 425,17 km<sup>2</sup>, dan kota yang memiliki luas wilayah terluas dan terkecil yaitu Kota Semarang dengan luas wilayah sebesar 373,67 km<sup>2</sup> dan Kota Magelang dengan luas wilayah hanya sebesar 18,12 km<sup>2</sup>.

**b. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta di lapangan. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi. Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 35 kabupaten dan kota. Semua kabupaten dan kota tersebut menjadi subjek dari penelitian ini, yang terdiri dari kabupaten dan kota sebagai berikut:



**Tabel 2. Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah**

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kab. Banjarnegara	19	Kab. Pemalang
2	Kab. Banyumas	20	Kab. Purbalingga
3	Kab. Batang	21	Kab. Purworejo
4	Kab. Blora	22	Kab. Rembang
5	Kab. Boyolali	23	Kab. Semarang
6	Kab. Brebes	24	Kab. Sragen
7	Kab. Cilacap	25	Kab. Sukoharjo
8	Kab. Demak	26	Kab. Tegal
9	Kab. Grobogan	27	Kab. Temanggung
10	Kab. Jepara	28	Kab. Wonogiri
11	Kab. Karanganyar	29	Kab. Wonosobo
12	Kab. Kebumen	30	Kota Magelang
13	Kab. Kendal	31	Kota Pekalongan
14	Kab. Klaten	32	Kota Salatiga
15	Kab. Kudus	33	Kota Semarang
16	Kab. Magelang	34	Kota Surakarta
17	Kab. Pati	35	Kota Tegal
18	Kab. Pekalongan		

Sumber: [www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berjumlah 175 yang didapatkan dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2016. Data tersebut diperoleh dari statistik keuangan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)).

## 2. Data Khusus

Terdapat empat data dalam penelitian ini yaitu tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal. Guna mendeskripsikan dan menguji

pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat, maka pada bagian ini akan disajikan deskripsi data yang telah diperoleh. Deskripsi data yang disajikan meliputi nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi.

Data khusus tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016 selengkapnya disajikan pada lampiran II dan III. Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016, maka nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	175	82.42	168,44	101,55	14,84
Pendapatan Asli Daerah	175	77799	1491646	233438,34	178266,17
Dana Perimbangan	175	387038	1941146	1000565,49	302544,47
Belanja Modal	175	51981	1026717	273814,07	154682,68
Valid N (litwise)	175				

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018

#### a. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah

daerah dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilihat berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016.

Data ini untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan perhitungan 3 rasio seperti yang telah dijelaskan pada Bab II dan hasil dari perhitungan sudah disajikan selengkapnya dilampiran II. Hasil analisis deskriptif variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 101,55, dan simpangan baku (*standard deviation*) sebesar 14,84. Nilai minimum dan maksimum masing-masing adalah 82,42 dan 168,44. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terendah ditunjukkan oleh Kabupaten Klaten tahun 2015, sedangkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tertinggi ditunjukkan oleh Kota Semarang tahun 2015.

#### **b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di suatu daerah berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku di mana. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah

daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Hasil analisis deskriptif variabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 233438,34 atau Rp 233.438.340.000,00 dan simpangan baku (*standard deviation*) sebesar 178266,17 atau Rp 178.266.170.000,00. Nilai minimum adalah sebesar 77799 atau Rp 77.798.871.000,00 diperoleh dari Kota Salatiga tahun 2012 dan nilai maksimum sebesar 1491646 atau Rp1.491.645.900.065,00 diperoleh dari Kota Semarang tahun 2016.

### **c. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Hasil analisis deskriptif variabel Dana Perimbangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 1000565,49 atau Rp1.000.565.490.000,00, dan simpangan baku (*standard deviation*) sebesar 302544,47 atau Rp 302.544.470.000,00. Nilai minimum adalah sebesar 387038 atau Rp 387.037.577.000,00 diperoleh dari Kota Salatiga tahun 2012 dan nilai maksimum sebesar 1941146 atau Rp1.941.145.933.885,00 diperoleh dari Kabupaten Cilacap tahun 2016.

#### **d. Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas *public service*.

Hasil analisis deskriptif variabel Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 273814,07 atau Rp273.814.070.000,00, dan simpangan baku (*standard deviation*) sebesar 154682,680 atau Rp 154.682.680,000,00. Nilai minimum adalah sebesar 51981 atau Rp 51.980.727.000,00 diperoleh dari Kabupaten Rembang tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar

1026717 atau Rp1.026.716.904.816,00 diperoleh dari Kota Semarang tahun 2016.

### 3. Analisis Data

#### a. Hasil Uji Asumsi Klasik

##### 1) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2011:105). Regresi bebas dari masalah multikolinieritas jika nilai *Tolerance* lebih dari 10 persen (0,10) dan nilai VIF kurang dari 10,00.

Tabel 4. Hasil Pengujian Multikolinieritas

Variabel	VIF	<i>Tolerance</i>	Keterangan
X1	1,962	0,510	Tidak terjadi multikolonieritas
X2	1,967	0,508	Tidak terjadi multikolonieritas
X3	2,943	0,340	Tidak terjadi multikolonieritas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas di atas, dapat diketahui bahwa nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* untuk ketiga variabel dibawah 10,00. Selain itu, nilai *Tolerance* ketiga variabel independen menunjukkan angka lebih besar dari 0,10. Berdasarkan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi syarat multikolinieritas.

## 2) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$ . Model regresi yang baik, tidak terjadi autokorelasi. Pada penelitian ini menggunakan Uji *Durbin Watson (DW test)*, yang akan didapatkan nilai  $DW$  hitung ( $d$ ) dan nilai  $DW$  tabel ( $dL$  dan  $dU$ ). Ghozali (2011:111) menyatakan bahwa untuk mengetahui ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji *Durbin Watson (DW test)*, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 5. Panduan Pengambilan Keputusan *Durbin Watson Test*

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d1$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No Desicison</i>	$0 \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-du < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	<i>No Desicison</i>	$4-du \leq d \leq 4-d1$
Tidak ada autokorelasi positif dan negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4-du$

Tabel 6. Hasil Pengujian Autokorelasi

Model	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	0,841	0,708	0,702	7,40648	1,901

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,901 sementara

dari tabel *Durbin Watson* dengan signifikansi 0,05, jumlah sampel sebanyak 175, serta jumlah variabel independen sebanyak 3 variabel ( $k=3$ ) diperoleh nilai  $dL$  sebesar 1,7180 dan  $dU$  sebesar 1,7877. Tidak terjadi autokorelasi jika  $dU < d < 4-dU$ , maka dalam penelitian ini dapat dibuktikan bahwa nilai *Durbin-Watson* terletak diantara  $dU$  dan  $4-dU$ . Data  $dU$  sebesar sebesar 1,7877 sehingga  $4-dU$  adalah sebesar 2,213 maka hasilnya  $1,7877 < 1,901 < 2,213$ . Berdasarkan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah model regresi yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011:139). Pada penelitian ini heteroskedastisitas menggunakan uji White.

Tabel 7. Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Model	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	0,300	0,090	0,058	145,53506	1,750

Berdasarkan Tabel 7, Nilai *Chi square* bisa dihitung dengan cara mengalikan *R Square* dengan jumlah data ( $n=175$ ). Pada tabel tersebut menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,090, sehingga didapat nilai *Chi Square* hitung adalah sebesar 15,75. Pada tabel *Chi Square*, diperoleh nilai *Chi Square* tabel sebesar 205,779. Hal ini menandakan bahwa



*Chi Square* hitung < *Chi Square* tabel. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada metode regresi, sehingga model regresi ini layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

## **b. Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Teknik analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hal ini dilakukan untuk menguji hipotesis pertama, kedua, dan ketiga. Hipotesis keempat diuji menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

### **1) Analisis Regresi Linier Sederhana**

#### **a) Pengujian Hipotesis Pertama**

##### **(1) Menentukan Garis Linier Sederhana**

Pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah “Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016”. Pengujian hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan persamaan  $Y = \alpha + bX$ . Hasil perhitungan regresi sederhana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Hasil Pengujian Regresi Sederhana Hipotesis Pertama

Model Regresi $X_1$	$(r_{x_1y})$	$(r^2_{x_1y})$	Sig.	Konstanta	Koefisien	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$
$X_1$ -Y	0,733	0,5372 89	0.000	76,341	0,00006	14,146	1,9739

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 8 di atas, maka dapat disusun persamaan regresinya yaitu  $Y = 76,341 + 0,00006 X_1$ . Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 76,341 menunjukkan besarnya Kinerja Keuangan (Y) akan positif tanpa dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah ( $X_1 = 0$ ). Koefisien regresi sebesar 0,00006 menunjukkan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah meningkat 1 (satu) satuan maka terjadi perubahan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 0,00006 dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

(2) Mencari Koefisien Korelasi ( $r_{x_1y}$ )

Koefisien korelasi yang digunakan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) mempunyai hubungan yang positif atau negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Berdasarkan Tabel 8 koefisien korelasi ( $r_{x_1y}$ ) sebesar 0,733, koefisien korelasi tersebut bernilai positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y), dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi

Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) maka semakin tinggi pula Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

(3) Mencari Koefisien Determinasi ( $r^2_{x1y}$ )

Berdasarkan Tabel 8 di atas nilai ( $r^2_{x1y}$ ) sebesar 0,537289. Hal ini menunjukkan bahwa 53,8% Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, sedangkan 46,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam uji hipotesis ini. Disamping itu, dapat diartikan juga bahwa variabel independen (Pendapatan Asli Daerah) mampu menjelaskan variabel dependen (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah) sebesar 53,8%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) memengaruhi variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

(4) Pengujian signifikansi koefisien korelasi dengan uji t

Hasil dari perhitungan  $t_{hitung}$  diperoleh data sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0,733\sqrt{175-2}}{\sqrt{1-0,537289}}$$

$$t_{hitung} = 14,146$$

Berdasarkan hasil uji nilai  $t_{hitung}$  sebesar 14,146 sementara  $t_{tabel}$  sebesar 1,9739. Yang berarti  $t_{hitung} > t_{tabel}$

(14,146 > 1,9739), dan nilai signifikansi dari Tabel 8 sebesar 0,000 lebih kecil dari *level of significant* (0,000 < 0,05) hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah signifikan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa besarnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan “Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016” dapat diterima.

#### **b) Pengujian Hipotesis Kedua**

##### **(1) Menentukan Garis Linier Sederhana**

Pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah “Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016”. Pengujian hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan persamaan  $Y = \alpha + bX$ . Hasil perhitungan regresi sederhana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Hasil Pengujian Regresi Sederhana Hipotesis Kedua

Model Regresi $X_2$	$(r_{x_2y})$	$(r^2_{x_2y})$	Sig.	Konstanta	Koefisien	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$
$X_2$ -Y	0,001	0,000001	0,992	88,798	-3,496E-8	-0,010	1,9739

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 9 di atas, maka dapat disusun persamaan regresinya yaitu  $Y = 88,798 - 0,00000003 X_2$ . Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 88,798 menunjukkan besarnya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan positif tanpa dipengaruhi oleh Dana Perimbangan ( $X_2 = 0$ ). Koefisien regresi sebesar  $-0,00000003$  menunjukkan bahwa jika Dana Perimbangan meningkat 1 (satu) satuan maka terjadi perubahan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar  $-0,00000003$  dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

(2) Mencari Koefisien Korelasi ( $r_{x_2y}$ )

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui apakah Dana Perimbangan ( $X_2$ ) mempunyai hubungan yang positif atau negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dan untuk mengetahui besarnya hubungan atau korelasi antara Dana Perimbangan ( $X_2$ ) dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Berdasarkan Tabel 9 koefisien korelasi ( $r_{x_2y}$ ) sebesar 0,001, koefisien korelasi tersebut bernilai positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

(Y), dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi Dana Perimbangan ( $X_2$ ) maka semakin tinggi pula Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

(3) Mencari Koefisien Determinasi ( $r^2_{x_2y}$ )

Berdasarkan Tabel 9 di atas nilai ( $r^2_{x_2y}$ ) sebesar 0,000001. Hal ini menunjukkan bahwa 0,0001 % Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel Dana Perimbangan ( $X_2$ ), sedangkan 99,999 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam uji hipotesis ini. Disamping itu, dapat diartikan juga bahwa variabel Dana Perimbangan mampu menjelaskan variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,0001 %. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Perimbangan ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

(4) Pengujian signifikansi koefisien korelasi dengan uji t

Hasil dari perhitungan  $t_{hitung}$  diperoleh data sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0\sqrt{175-2}}{\sqrt{1-0,000001}}$$

$$t_{hitung} = -0,01$$

Berdasarkan hasil pengujian  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,01$  sementara  $t_{tabel}$  sebesar  $1,9739$ . Artinya  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-0,01 < 1,9739$ ), dan nilai signifikansi dari Tabel 10 sebesar  $0,992$  lebih besar dari *level of significant* ( $0,992 > 0,05$ ) hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Dana Perimbangan ( $X_2$ ) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah tidak signifikan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan “Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016” dapat diterima.

### c) Pengujian Hipotesis Ketiga

#### (1) Menentukan Garis Linier Sederhana

Pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah “Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016”. Pengujian hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan persamaan  $Y = \alpha + bX$ . Hasil perhitungan regresi sederhana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Hasil Pengujian Regresi Sederhana Hipotesis Ketiga

Model Regresi $X_3$	$(r_{x_3y})$	$(r^2_{x_3y})$	Sig.	Konstanta	Koefisien	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$
$X_3$ -Y	0,368	0,135424	0,000	80,589	0,00003	5,189	1,9739

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 10 di atas, maka dapat disusun persamaan regresinya yaitu  $Y = 80,589 + 0,00003 X_3$ . Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 80,589 menunjukkan besarnya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan positif tanpa dipengaruhi oleh Belanja Modal ( $X_3 = 0$ ). Koefisien regresi sebesar 0,00003 menunjukkan bahwa jika Belanja Modal meningkat 1 (satu) satuan maka terjadi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 0,00003 dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

(2) Mencari Koefisien Korelasi ( $r_{x_3y}$ )

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui apakah Belanja Modal ( $X_3$ ) mempunyai hubungan yang positif atau negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dan untuk mengetahui besarnya hubungan atau korelasi antara Belanja Modal ( $X_3$ ) dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Berdasarkan Tabel 10 koefisien korelasi ( $r_{x_3y}$ ) sebesar 0.368, koefisien korelasi tersebut bernilai positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi Belanja



Modal ( $X_3$ ) maka semakin tinggi pula Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

- (3) Mencari koefisien determinasi ( $r^2_{x_3y}$ )

Berdasarkan tabel di atas nilai ( $r^2_{x_3y}$ ) sebesar 0,135424.

Hal ini menunjukkan bahwa 13,5% Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel Belanja Modal, sedangkan 86,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam uji hipotesis ini. Disamping itu, dapat diartikan juga bahwa variabel Belanja Modal mampu menjelaskan sebesar 13,5 %. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Modal ( $X_3$ ) memengaruhi variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

- (4) Pengujian signifikansi koefisien korelasi dengan uji t

Hasil dari perhitungan  $t_{hitung}$  diperoleh data sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0,368\sqrt{175-2}}{\sqrt{1-0,135424}}$$

$$t_{hitung} = 5,189$$

Berdasarkan hasil pengujian, nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,189 sementara  $t_{tabel}$  sebesar 1,9739. Yang berarti  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,189 > 1,9739$ ), dan nilai signifikansi dari Tabel 10 sebesar

0,000 lebih kecil dari *level of significant* ( $0,000 < 0,05$ ) hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Belanja Modal ( $X_3$ ) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah signifikan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan “Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016” dapat diterima.

## 2) Analisis Regresi Linier Berganda

- a) Menentukan garis persamaan tiga prediktor

Tabel 11. Hasil Pengujian Regresi Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi	T	Sig
Konstanta	92,481	49,423	0,000
$X_1$	7,700E-5	16,005	0,000
$X_2$	-2,402E-5	-8,634	0,000
$X_3$	6,390E-6	0,968	0,334
$(R_{Y(1,2,3)})$			0,841
Koefisien determinasi ( $R^2_{Y(1,2,3)}$ )			0,707281
$F_{hitung}$			137,131
Sig F			0,000
$F_{tabel}$			2,66

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil regresi linier berganda, maka dapat disusun persamaan faktor-faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu  $Y = 92,481 + 0,00007X_1 - 0,00002X_2$

+0,000006  $X_3$ . Nilai koefisien  $X_1$  sebesar 0,00007 yang berarti Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) meningkat 1 satuan maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan terjadi perubahan sebesar 0,00007 dengan asumsi  $X_2$ , dan  $X_3$  tetap. Nilai koefisien  $X_2$  sebesar -0,00002 yang berarti Dana Perimbangan ( $X_2$ ) meningkat 1 satuan maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan terjadi perubahan sebesar -0,00002 dengan asumsi  $X_1$ , dan  $X_3$  tetap. Nilai koefisien  $X_3$  sebesar 0,000006 yang berarti Belanja Modal ( $X_3$ ) meningkat sebesar 1 satuan maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan terjadi perubahan sebesar 0,000006 dengan asumsi  $X_1$ , dan  $X_2$  tetap.

b) Menentukan Koefisien korelasi regresi linier berganda ( $R_{y(1,2,3)}$ )

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), Dana Perimbangan ( $X_2$ ), dan Belanja Modal ( $X_3$ ) secara bersama-sama mempunyai hubungan yang positif atau negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dan untuk mengetahui besarnya hubungan atau korelasi antara Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), Dana Perimbangan ( $X_2$ ), dan Belanja Modal ( $X_3$ ) dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Berdasarkan Tabel 11 koefisien korelasi ( $R_{y(1,2,3)}$ ) sebesar 0,841, koefisien korelasi tersebut bernilai positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), Dana Perimbangan ( $X_2$ ), dan Belanja

Modal ( $X_3$ ) maka semakin tinggi pula Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

- c) Menentukan koefisien determinasi regresi linier berganda ( $R^2_{y(1,2,3)}$ )

Berdasarkan hasil pengujian Tabel 11 hasil koefisien determinasi ( $R^2_{y(1,2,3)}$ ) menunjukkan hasil sebesar 0,707281 atau 70,8 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal sebesar 70,8%, sedangkan sisanya yaitu 29,2 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

- d) Menguji signifikansi regresi linier berganda dengan uji F

Hasil dari perhitungan  $F_{hitung}$  diperoleh data sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

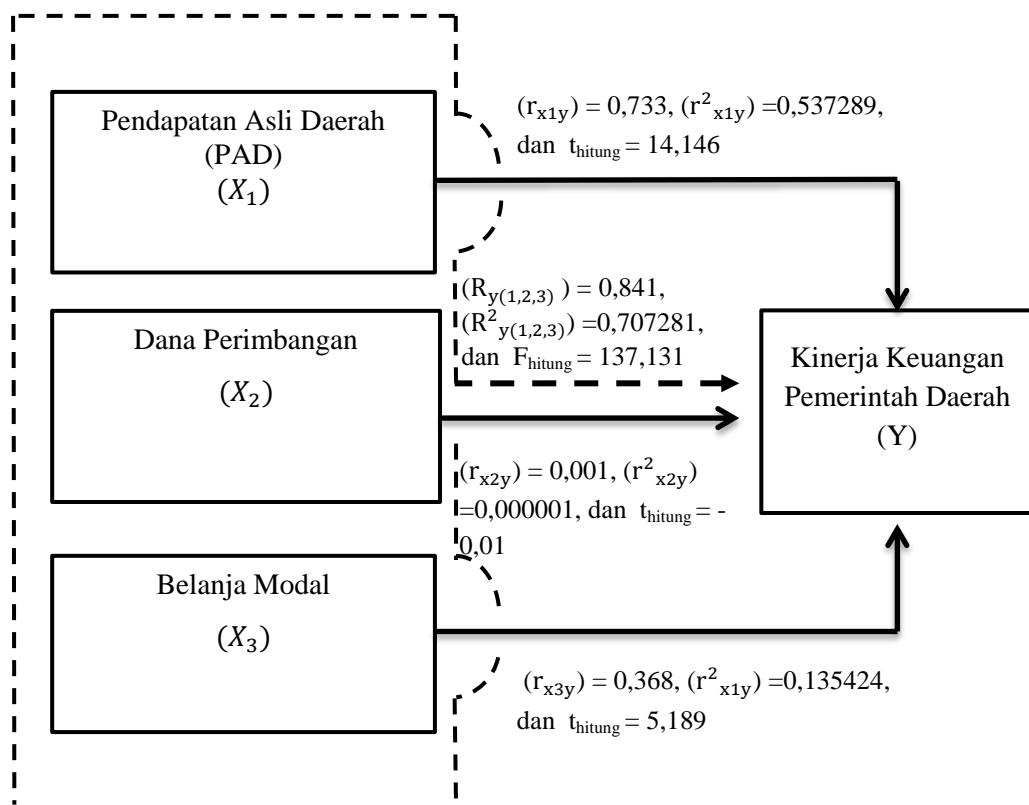
$$F_{hitung} = \frac{0,708/3}{(1 - 0,708)/(175 - 3 - 1)}$$

$$F_{hitung} = 137,131$$

Berdasarkan Tabel 11, menunjukkan hasil dari uji F yaitu  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  dengan nilai sebesar  $137,131 > 2,66$ , dan nilai signifikansi dari Tabel 11 sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan nilai probabilitas yang ditentukan yaitu 0,05 ( $0,000 > 0,05$ ). Hal ini dapat diartikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh

secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian hipotesis keempat yaitu “Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016” dapat diterima.

### B. Pembahasan Hasil Penelitian



**Gambar 3. Ringkasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan Gambar 3 di atas maka pembahasan adalah sebagai berikut:

**1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016**

Hasil penelitian mendukung hipotesis pertama bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis yang menggunakan regresi sederhana diperoleh persamaan garis regresi satu prediktor  $Y = 76,341 + 0,00006 X_1$ . Artinya nilai konstanta  $\alpha$  yaitu 76,341 dan nilai Pendapatan Asli Daerah (b/koeffisien regresi) sebesar 0,00006 menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Koefisien korelasi sebesar ( $r_{x_1y}$ ) sebesar 0,733 dan koefisien determinasi ( $r^2_{x_1y}$ ) sebesar 0,537289. Hal ini menunjukkan bahwa 53,8 % Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), sementara 46,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam uji hipotesis ini. Nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000; Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 14,146 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,9739 sehingga pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah positif dan signifikan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Fajar Nugroho dan Abdul Rohman (2012) yang berpendapat bahwa Pendapatan Asli

Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, akan tetapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Rochmah (2015), Juliawati, et. al. (2012), dan Ayu Tutia Ningsih (2010) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah mengakibatkan peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam pemilikan potensi, penggalan, dan pengelolaan potensi yang baik sehingga semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah serta memaksimalkan penerimaan daerah sehingga menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan yang bersih yang berhak diakui pemerintah daerah yang mana pemerintah daerah berwenang dan memiliki kebebasan dalam hal mengelola sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribudi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah maka menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan optimalisasi potensi dan sumber pendapatan suatu daerah tersebut sehingga akan memaksimalkan penerimaan pemerintahan daerah yang nantinya akan berdampak pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang semakin baik.

Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah lebih menekankan hasil atas Pendapatan Asli Daerah terutama dari sumber penerimaan Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah karena dua sektor tersebut merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka semakin baik Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan pemahaman bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya akan semakin meningkat, dan tidak lagi bergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat.

## **2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016**

Hasil penelitian dari hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis regresi sederhana diperoleh persamaan garis regresi satu prediktor  $Y = 88,798 - 0,00000003 X_2$ . Artinya nilai konstanta  $\alpha$  yaitu 88,798 dan nilai Dana Perimbangan (b/koeffisien regresi) sebesar -0,00000003 menunjukkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Koefisien korelasi ( $r_{x_2y}$ ) sebesar 0,001 dan koefisien determinasi ( $r^2_{x_2y}$ ) sebesar 0,000001. Hal ini menunjukkan bahwa



0,0001 % Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel Dana Perimbangan ( $X_2$ ), sedangkan 99,999 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam uji hipotesis ini. Nilai signifikansi sebesar 0,992 lebih besar dari 0,05; dan Nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,01 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,9739 sehingga pengaruh variabel Dana Perimbangan ( $X_2$ ) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah positif namun tidak signifikan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Juliawati et. al. (2012) dan Siti Nur Rochmah (2015) yang berpendapat bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, akan tetapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Estetika Mutiaranisa Kurniawati (2015) yang berpendapat bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah karena semakin besar Dana Perimbangan yang diperoleh dari pemerintah daerah maka dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu, untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat akan mentransfer dana dalam bentuk Dana

Perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, adanya kewajiban pemerintah pusat kepada daerah masih sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah sehingga diperlukan Dana Perimbangan untuk mempercepat pembangunan daerah.

Tingkat kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi hal ini bergantung kondisi daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam atau tidak, daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah, serta adanya kewajiban untuk menjaga ketercapaian standar pelayanan minimum di setiap daerah. Daerah dengan sumber daya yang sedikit memerlukan subsidi atau Dana Perimbangan agar dapat mencapai standar pelayanan minimum itu. Oleh karena itu dengan adanya Dana Perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat maka pemerintah daerah dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Namun disisi lain, hal ini dapat pula menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat tersebut tinggi, sehingga kemandirian suatu daerah tersebut menurun.

### **3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016**

Hasil penelitian mendukung hipotesis ketiga bahwa variabel Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun

Anggaran 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis regresi satu prediktor  $Y = 80,589 + 0,00003 (X_3)$ . Artinya nilai konstanta  $\alpha$  yaitu 80,589 dan nilai Belanja Modal (b/koefisien regresi) sebesar 0,00003 menunjukkan bahwa Belanja Modal ( $X_3$ ) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Koefisien korelasi ( $r_{x_3y}$ ) sebesar 0,368 dan koefisien determinasi ( $r^2_{x_3y}$ ) sebesar 0,135424. Hal ini menunjukkan bahwa 13,5% Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel Belanja Modal, sedangkan 86,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam uji hipotesis ini. Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05; dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,189 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,9739 sehingga pengaruh Belanja Modal ( $X_3$ ) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah positif dan signifikan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Siti Nur Rochmah (2015) yang menyatakan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, akan tetapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajar Nugroho dan Abdul Rohman (2012), serta Ratri Patrati (2010) yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, karena dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan semakin meningkatnya alokasi Belanja Modal menunjukkan peningkatan investasi yang dilakukan sehingga semakin tinggi Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Belanja Modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memberikan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan Belanja Modal yang baik dari segi seorang manajer di suatu entitas pemerintahan di daerah yaitu kepala daerah harus paham betul asas yang berlaku serta ukuran Kinerja untuk menilai keberhasilan setiap kegiatan yang dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Ada pun ukuran keberhasilan dari segi Belanja Modal menurut (Abdul Halim, 2014) adalah lima tepat, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tetap sasaran, dan tetap harga. Sehingga banyaknya dana yang dialokasikan untuk Belanja Modal maka nantinya dapat mewujudkan terciptakanya infrastruktur dan sarana yang semakin baik dan tepat.

Tersedianya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi diberbagai sektor dan produktivitas masyarakat semakin tinggi dan terjadi peningkatan kesejahteraan. Sementara itu apabila semakin banyak pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah maka nantinya dapat pula meningkatkan pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pengalokasian Belanja Modal secara tepat dapat berkontribusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga dapat

meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, pengalokasian yang lebih banyak pada Belanja Modal nantinya dapat membantu masyarakat dalam pembangunan dan juga diharapkan diperolehnya sumber-sumber keuangan yang berguna untuk meningkatkan pendapatan daerah.

4. **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016**

Hasil penelitian mendukung hipotesis keempat bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan dengan analisis regresi berganda diperoleh hasil adalah nilai konstanta  $\alpha$  sebesar 92,481; Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,00007; Dana Perimbangan sebesar -0,00002; dan Belanja Modal sebesar 0,000006 sehingga persamaan regresinya adalah  $Y = 92,481 + 0,00007X_1 - 0,00002X_2 + 0,000006 X_3$ .

Berdasarkan persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien  $X_1$  sebesar 0,00007 yang berarti Pendapatan Asli Daerah meningkat 1 satuan maka akan terjadi perubahan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,00007 dengan asumsi  $X_2$ , dan  $X_3$  tetap. Nilai koefisien  $X_2$  sebesar -0,00002 berarti Dana Perimbangan

meningkat 1 satuan maka akan terjadi perubahan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar -0,00002 dengan asumsi  $X_1$ , dan  $X_3$  tetap. Nilai koefisien  $X_3$  sebesar 0,000006 yang berarti Belanja Modal meningkat sebesar 1 satuan maka akan terjadi perubahan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,000006 dengan asumsi  $X_1$ , dan  $X_2$  tetap.

Hasil uji F dilihat dari tabel ANOVA dalam kolom *sig.* digunakan taraf signifikansi 5% (0,05), jika nilai probabilitas < 0,05. Dari tabel ANOVA tersebut dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  dengan nilai sebesar  $1237,131 > 2,66$ . Yang artinya secara bersama-sama pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), Dana Perimbangan ( $X_2$ ) dan Belanja Modal ( $X_3$ ) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah positif dan signifikan. Nilai koefisien korelasi ( $R_{y(1,2,3)}$ ) sebesar 0,841 dan nilai koefisien determinasi ( $R^2_{y(1,2,3)}$ ) sebesar 0,707281 atau 70,8 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal sebesar 70,8 % sedangkan sisanya yaitu 29,2 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), Dana Perimbangan ( $X_2$ ) dan Belanja Modal ( $X_3$ ) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna.

Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal.
2. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah hanya menggunakan tiga analisis rasio, yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Desentralisasi Fiskal.
3. Adanya keterbatasan penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi berupa data sekunder, dan tidak menggunakan data primer.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Penelitian ini menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan garis regresi  $Y = 76,341 + 0,00006 X_1$ , nilai koefisien korelasi ( $r_{x_1y}$ ) yaitu sebesar 0,733 dan nilai koefisien determinasi ( $r^2_{x_1y}$ ) sebesar 0,537289. Nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ), dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 14,146 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,9739 ( $14,146 > 1,9739$ ).
2. Dana Perimbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan garis regresi  $Y = 88,798 - 0,00000003 X_2$ , nilai koefisien korelasi ( $r_{x_2y}$ ) yaitu sebesar 0,001; dan nilai



koefisien determinasi ( $r^2_{x2y}$ ) sebesar 0,000001. Nilai signifikansi variabel Dana Perimbangan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,992 ( $0,992 > 0,05$ ), dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,010$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,9739 ( $-0,010 < 1,9739$ ).

3. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan garis regresi  $Y = 80,589 + 0,00003 X_1$ , nilai koefisien korelasi ( $r_{x3y}$ ) yaitu sebesar 0,368; dan Nilai koefisien determinasi ( $r^2_{x3y}$ ) sebesar 0,135424. Nilai signifikansi variabel Belanja Modal lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ), dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,189 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,9739 ( $5,189 > 1,9739$ ).
4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Hal ini ditunjukkan persamaan regresi  $Y = 92,481 + 0,00007X_1 - 0,00002X_2 + 0,000006 X_3$ , nilai koefisien korelasi ( $R_{y(1,2,3)}$ ) sebesar 0,841; dan nilai koefisien determinasi ( $R^2_{y(1,2,3)}$ ) sebesar 0,707281. Nilai signifikansi dari ketiga variabel adalah 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan nilai probabilitas yang telah ditentukan yaitu 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), dan Nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  dengan nilai sebesar  $49,423 > 2,66$ .

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran-saran yang diajukan adalah:

### **1. Bagi Instansi**

- Pemerintah daerah selaku yang berwenang dalam mengelola keuangan daerah diharapkan dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi yaitu dengan pembinaan, dan ekstensifikasi yaitu dengan penggalan potensi, karena Pendapatan Asli Daerah adalah penentu kemandirian daerah.
- Setiap Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah lebih meningkatkan investasi dalam bentuk fisik sehingga aset tetap setiap tahun meningkat, sehingga dengan adanya sarana yang meningkat maka dapat mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat.

### **2. Bagi Masyarakat**

Masyarakat selaku pengendali pemerintah dapat mendukung program pemerintah dengan memberikan kritik dan saran terhadap kinerja pemerintah jika dilihat dari segi keuangan dan ditujukan untuk umum. Masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasinya untuk pemerintah yang lebih baik dengan cara sesuai ketentuan. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat pemerintah akan sesuai kebutuhan masyarakatnya, terutama di daerah.

### 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

- Meninjau Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah untuk provinsi-provinsi lain mengingat ada 33 provinsi di Indonesia.
- Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan rasio lain selain Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Desentralisasi Fiskal dalam mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang diantaranya adalah Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, dan DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*).
- Meninjau variabel-variabel independen lainnya selain yang digunakan yaitu Pajak Daerah, *Real Estate*, *Capital*, *Grant*, dan PDRB ataupun faktor non keuangan seperti kebijakan pemerintah dan mikro ekonomi agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2009). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia* Jakarta: Erlangga.
- Darise. N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi sektor Publik*. Jakarta: Indeks.
- Djaenuri. Aries. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat- Daerah*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Ditjen Bina Keuangan Daerah. (2013). “Belanja Modal Pemda Harus Capai 30 Persen”. *Artikel*. <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30-persen>.
- Ghozali. I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariante dengan program SPSS*. Edisi V. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Halim. Abdul. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba empat.
- (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba empat.
- Hadi. Sutrisno. (2004). *Metodologi Research* Jilid 3. Yogyakarta : Andi.
- Hendro. Sumarjo. (2010). “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. UNS.
- Irham. Fahmi. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Irianto. A. (2009). *Statistika Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jawa Tengah Pos. (2015). “Jawa Tengah diminta gali potensi sumber pajak lain”. *Berita*. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/05/27/o7tyb6361-jawa-tengah-diminta-gali-potensi-sumber-pajak-lain>.
- Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Juliawati, Ebit, Darwanis. Jalaluddin. (2012). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”. *Tesis*. Universitas Syiah Kuala: Banda Aceh.
- KSAP. (2006). *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah*.
- Mardiasmo. (2007). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mahsun. M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPF: Yogyakarta.
- Mutiaranisa. Estetika. (2015). “Analisis Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, PDRB, dan IPM terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah pada Daerah Otonom Baru di Indonesia”. *Thesis*. Universitas Sebelas Maret.
- Ningsih. Ayu. (2010). “Analisis Faktor Keuangan dan Faktor Lingkungan yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah)”. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Nugroho, Fajar. (2012). “Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah)”. *Jurnal Skripsi*. Universitas Diponegoro
- Nur, T. (2011). *Tiga belas masalah pengelolaan keuangan negara dan daerah*. [www.rajawaligarudapancasila.blogspot.com](http://www.rajawaligarudapancasila.blogspot.com).
- Patriati. Ranti. (2010). “Analisis faktor-faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Priyatno, D. (2013). *Olah Data Statistik dengan Program PSPP (sebagai Alternatif SPSS)*. Yogyakarta: MediaKom.
- Puspitaningrum. Merynda. (2015). “Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi DIY dengan Pertumbuhan

- Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai variabel *Intervening*". *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rachmah. Siti Nur. (2015). "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kota dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012)". *Skripsi*. UMS
- Resmi. Siti. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (2004). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagas Akun Standar*.
- Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Siahaan. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta :Rajawali Pers.
- Suprpto.Tri. (2006). "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam masa Otonomi Daerah 2000-2004". *Skripsi* .UII.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. : Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.

Supriyadi, E. (2014). *SPSS+ Amos Statistika Data Anaylisis*. Jakarta: Penerbit IN MEDIA.

Sujarweni, V. Wiratna dan Poly Endaryanto. (2012). *Statistika untuk Penelitian*, Yogyakarta; Graha Ilmu.

Widarto. (2013). *Penelitian Ex Post Facto*. Makalah disampaikan pada Kegiatan Pelatihan Metodologi Penelitian Pendidikan, di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131808327/pengabdian/8penelitian-ex-post-facto.pdf>.

Widarjono. Agus. (2010). *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Edisi pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

[www.djkg.depkeu.go.id](http://www.djkg.depkeu.go.id). Diakses Senin 25 Desember 2017.

[www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id). Diakses Senin 22 Januari 2018.

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Diakses Senin 25 Desember 2017.

**Lampiran1. Daftar Daerah Kabupaten dan Kota Populasi Penelitian**

<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>
1	Kab.Banjarnegara	20	Kab.Purbalingga
2	Kab. Banyumas	21	Kab. Purworejo
3	Kab.Batang	22	Kab. Rembang
4	Kab. Blora	23	Kab. Semarang
5	Kab.Boyolali	24	Kab.Sragen
6	Kab.Brebes	25	Kab.Sukoharjo
7	Kab.Cilacap	26	Kab. Tegal
8	Kab.Demak	27	Kab.Temanggung
9	Kab.Grobogan	28	Kab.Wonogiri
10	Kab.Jepara	29	Kab.Wonosobo
11	Kab. Karanganyar	30	Kota Magelang
12	Kab. Kebumen	31	Kota Pekalongan
13	Kab. Kendal	32	Kota Salatiga
14	Kab.Klaten	33	Kota Semarang
15	Kab.Kudus	34	Kota Surakarta
16	Kab. Magelang	35	Kota Tegal
17	Kab.Pati		
18	Kab. Pekalongan		
19	Kab.Pemalang		



## Lampiran 2. Data Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

NO	Kabupaten/Kota	Tahun	RK (PAD/PT)*	Rket (PT/TPD)*	RDF (PAD/TPD)*	KKPD*
1	Kab. Banjarnegara	2012	11.86	66.61	7.90	86.37
		2013	11.25	68.74	7.73	87.73
		2014	17.65	65.25	11.52	94.43
		2015	17.64	60.45	10.66	88.75
		2016	17.49	68.85	12.04	98.38
2	Kab. Banyumas	2012	20.21	65.98	13.34	99.53
		2013	24.25	62.40	15.13	101.78
		2014	32.06	58.85	18.87	109.78
		2015	35.58	53.19	18.92	107.69
		2016	28.97	65.51	18.98	113.46
3	Kab. Batang	2012	12.50	72.56	9.07	94.14
		2013	19.72	66.95	13.21	99.89
		2014	22.52	63.29	14.25	100.06
		2015	22.05	58.36	12.87	93.29
		2016	20.36	68.83	14.01	103.19
4	Kab. Blora	2012	10.03	72.53	7.27	89.83
		2013	10.56	69.76	7.36	87.68
		2014	14.85	64.27	9.54	88.66
		2015	15.34	61.84	9.49	86.67
		2016	12.86	71.66	9.22	93.74
5	Kab. Boyolali	2012	14.29	70.29	10.05	94.63
		2013	16.60	66.20	10.99	93.78
		2014	21.46	63.35	13.59	98.40
		2015	23.86	56.39	13.45	93.70
		2016	21.52	68.14	14.66	104.33
6	Kab. Brebes	2012	9.03	71.94	6.50	87.47
		2013	10.72	70.05	7.51	88.29
		2014	20.02	65.45	13.10	98.57
		2015	21.77	57.39	12.49	91.65
		2016	19.41	67.92	13.18	100.51
7	Kab. Cilacap	2012	15.73	69.74	10.97	96.45
		2013	20.11	65.28	13.13	98.52
		2014	25.48	62.00	15.80	103.28
		2015	26.22	57.10	14.97	98.30
		2016	22.08	69.43	15.33	106.83
8	Kab. Demak	2012	13.21	65.94	8.71	87.86
		2013	15.78	62.63	9.88	88.29
		2014	23.91	56.27	13.45	93.62
		2015	26.06	54.61	14.23	94.91
		2016	22.69	64.89	14.72	102.30

NO	Kabupaten/Kota	Tahun	RK (PAD/PT)*	Rket (PT/TPD)*	RDF (PAD/TPD)*	KKPD*
9	Kab. Grobogan	2012	10.80	73.79	7.97	92.55
		2013	13.36	69.36	9.27	91.98
		2014	20.81	66.09	13.75	100.65
		2015	22.99	58.79	13.52	95.30
		2016	25.37	64.92	16.47	106.76
10	Kab. Jepara	2012	15.12	65.45	9.90	90.47
		2013	14.25	67.70	9.65	91.60
		2014	22.89	63.28	14.48	100.65
		2015	24.45	57.24	14.00	95.69
		2016	23.31	65.70	15.31	104.32
11	Kab. Karanganyar	2012	13.94	68.13	9.50	91.57
		2013	17.95	65.79	11.81	95.56
		2014	22.52	59.14	13.32	94.98
		2015	24.76	56.25	13.93	94.94
		2016	21.67	69.08	14.97	105.73
12	Kab. Kebumen	2012	9.69	73.02	7.08	89.78
		2013	11.58	69.81	8.08	89.47
		2014	19.62	62.72	12.31	94.65
		2015	18.25	57.75	10.54	86.54
		2016	16.35	68.29	11.17	95.81
13	Kab. Kendal	2012	14.21	73.02	10.37	97.60
		2013	14.95	65.54	9.80	90.28
		2014	22.32	62.38	13.92	98.63
		2015	24.04	57.92	13.92	95.89
		2016	20.97	66.92	14.03	101.93
14	Kab. Klaten	2012	7.72	72.65	5.61	85.98
		2013	9.83	67.68	6.65	84.16
		2014	14.23	65.14	9.27	88.63
		2015	14.89	58.77	8.75	82.42
		2016	14.25	69.67	9.93	93.85
15	Kab. Kudus	2012	14.66	71.96	10.55	97.16
		2013	15.19	68.86	10.46	94.51
		2014	23.12	62.87	14.54	100.53
		2015	24.70	58.86	14.54	98.10
		2016	21.63	68.63	14.85	105.11
16	Kab. Magelang	2012	12.64	74.64	9.43	96.70
		2013	17.56	69.08	12.13	98.77
		2014	23.15	73.27	16.96	113.37
		2015	24.22	55.50	13.44	93.16
		2016	23.78	59.58	14.17	97.53

NO	Kabupaten/Kota	Tahun	RK (PAD/PT)*	Rket (PT/TPD)*	RDF (PAD/TPD)*	KKPD*
17	Kab. Pati	2012	16.41	67.49	11.08	94.98
		2013	15.45	64.18	9.91	89.54
		2014	23.99	59.98	14.39	98.36
		2015	25.52	55.69	14.21	95.42
		2016	19.94	64.60	12.88	97.42
18	Kab. Pekalongan	2012	14.51	70.97	10.30	95.78
		2013	17.24	69.50	11.98	98.72
		2014	27.70	62.44	17.30	107.44
		2015	25.72	57.62	14.82	98.16
		2016	26.27	66.15	17.38	109.80
19	Kab. Pemalang	2012	10.14	71.82	7.29	89.25
		2013	13.25	69.22	9.17	91.64
		2014	19.75	65.22	12.88	97.85
		2015	19.19	61.08	11.72	91.98
		2016	18.27	71.38	13.04	102.68
20	Kab. Purbalingga	2012	13.70	69.65	9.54	92.88
		2013	14.79	70.00	10.35	95.15
		2014	23.33	64.53	15.06	102.92
		2015	23.92	57.50	13.76	95.18
		2016	21.42	67.33	14.42	103.17
21	Kab. Purworejo	2012	11.86	81.81	9.71	103.39
		2013	14.48	68.32	9.90	92.71
		2014	21.35	65.09	13.90	100.33
		2015	23.71	53.54	12.70	89.95
		2016	19.43	63.59	12.35	95.37
22	Kab. Rembang	2012	14.92	68.03	10.15	93.11
		2013	17.69	61.50	10.88	90.08
		2014	21.34	58.35	12.45	92.14
		2015	22.65	60.52	13.71	96.88
		2016	25.02	59.81	14.96	99.79
23	Kab. Semarang	2012	19.28	64.36	12.41	96.04
		2013	24.53	64.01	15.70	104.25
		2014	25.96	62.52	16.23	104.72
		2015	29.28	56.78	16.63	102.69
		2016	24.03	67.02	16.10	107.15
24	Kab. Sragen	2012	14.34	68.01	9.76	92.11
		2013	15.05	66.36	9.99	91.40
		2014	24.19	59.68	14.44	98.31
		2015	23.20	57.02	13.23	93.44
		2016	20.60	68.93	14.20	103.73

NO	Kabupaten/Kota	Tahun	RK (PAD/PT)*	Rket (PT/TPD)*	RDF (PAD/TPD)*	KKPD*
25	Kab. Sukoharjo	2012	21.69	62.47	13.55	97.71
		2013	22.85	61.84	14.13	98.82
		2014	29.19	57.76	16.86	103.81
		2015	33.23	52.95	17.60	103.78
		2016	29.12	64.55	18.80	112.47
26	Kab. Tegal	2012	11.98	73.15	8.76	93.90
		2013	14.58	68.09	9.93	92.60
		2014	22.21	61.98	13.76	97.95
		2015	25.62	56.58	14.50	96.70
		2016	26.44	94.71	25.04	146.20
27	Kab. Temanggung	2012	11.10	73.15	8.12	92.37
		2013	13.74	70.51	9.69	93.93
		2014	19.87	65.98	13.11	98.95
		2015	25.00	57.84	14.46	97.30
		2016	26.48	63.30	16.76	106.53
28	Kab. Wonogiri	2012	10.55	70.80	7.47	88.82
		2013	10.74	69.79	7.49	88.02
		2014	16.73	63.58	10.64	90.95
		2015	18.43	58.36	10.76	87.55
		2016	14.87	72.24	10.74	97.85
29	Kab. Wonosobo	2012	11.80	67.66	7.99	87.45
		2013	14.34	66.26	9.50	90.10
		2014	21.26	64.57	13.73	99.56
		2015	21.83	58.40	12.75	92.98
		2016	18.52	68.49	12.69	99.70
30	Kota Magelang	2012	22.95	68.64	15.75	107.34
		2013	24.99	67.92	16.97	109.88
		2014	35.87	62.55	22.44	120.85
		2015	40.34	59.23	23.89	123.46
		2016	38.81	67.57	26.23	132.61
31	Kota Pekalongan	2012	22.25	66.76	14.85	103.85
		2013	25.38	66.66	16.92	108.96
		2014	30.31	62.36	18.90	111.58
		2015	30.96	60.66	18.78	110.39
		2016	29.84	69.80	20.83	120.46
32	Kota Salatiga	2012	20.10	68.83	13.84	102.76
		2013	26.27	66.95	17.59	110.81
		2014	36.85	61.81	22.78	121.44
		2015	36.63	60.75	22.25	119.63
		2016	35.76	64.77	23.16	123.69

NO	Kabupaten/Kota	Tahun	RK (PAD/PT)*	Rket (PT/TPD)*	RDF (PAD/TPD)*	KKPD*
33	Kota Semarang	2012	66.79	46.07	30.77	143.63
		2013	77.74	42.59	33.11	153.44
		2014	89.30	40.26	35.96	165.52
		2015	94.59	37.95	35.90	168.44
		2016	90.72	40.07	36.35	167.14
34	Kota Surakarta	2012	32.62	57.31	18.69	108.61
		2013	39.78	54.16	21.55	115.48
		2014	42.10	52.26	22.00	116.36
		2015	49.33	48.18	23.77	121.28
		2016	38.55	64.82	24.99	128.35
35	Kota Tegal	2012	39.69	60.66	24.07	124.42
		2013	40.97	59.46	24.36	124.80
		2014	55.31	53.43	29.55	138.29
		2015	54.23	52.86	28.67	135.76
		2016	41.75	65.47	27.34	134.56

\*Keterangan:

RK :Rasio Kemandirian

RKet : Rasio Ketergantungan

RDF : Rasio Desentralisasi Fiskal

PAD :Pendapatan Asli Daerah

PT :Pendapatan Transfer

TPD :Total Penerimaan Daerah

KKPD :Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

**Lampiran 3. Data Penelitian (Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016 ) (Dalam Jutaan Rupiah)**

NO	Kabupaten/Kota	TAHUN	PAD (X1)	DANA PERIMBANGAN (X2)	BELANJA MODAL (X3)	KINERJA KEUANGAN PEMDA (Y)
1	Kab. Banjarnegara	2012	94,271	794,742	158,301	86.37
		2013	98,975	879,697	175,918	87.73
		2014	161,653	915,783	206,494	94.43
		2015	180,561	1,023,678	329,811	88.75
		2016	221,048	1,264,069	487,536	98.38
2	Kab. Banyumas	2012	242,107	1,197,890	234,952	99.53
		2013	308,349	1,271,384	313,189	101.78
		2014	435,598	1,358,535	360,165	109.78
		2015	502,281	1,411,687	362,745	107.69
		2016	541,418	1,869,097	400,833	113.46
3	Kab. Batang	2012	84,720	677,708	133,480	94.14
		2013	143,503	727,549	148,223	99.89
		2014	172,638	766,582	157,304	100.06
		2015	179,721	814,900	193,436	93.29
		2016	209,958	1,031,466	223,872	103.19
4	Kab. Blora	2012	81,987	817,542	219,108	89.83
		2013	95,193	901,825	260,455	87.68
		2014	144,724	974,574	335,137	88.66
		2015	156,403	1,019,665	326,178	86.67
		2016	171,278	1,331,611	434,954	93.74
5	Kab. Boyolali	2012	127,725	893,578	207,759	94.63
		2013	160,752	968,601	249,112	93.78
		2014	227,516	1,060,319	303,853	98.40
		2015	260,634	1,092,341	310,175	93.70
		2016	292,310	1,358,445	373,916	104.33
6	Kab. Brebes	2012	101,807	1,127,361	192,983	87.47
		2013	133,836	1,248,282	325,841	88.29
		2014	267,771	1,337,754	282,972	98.57
		2015	301,954	1,387,122	469,584	91.65
		2016	339,156	1,747,010	784,628	100.51
7	Kab. Cilacap	2012	196,673	1,250,042	308,872	96.45
		2013	278,508	1,384,770	421,187	98.52
		2014	374,024	1,467,806	414,435	103.28
		2015	409,846	1,562,968	582,531	98.30
		2016	428,598	1,941,146	843,986	106.83
8	Kab. Demak	2012	105,363	797,462	339,018	87.86
		2013	138,214	876,059	352,310	88.29
		2014	220,330	921,597	540,354	93.62
		2015	254,324	975,938	549,775	94.91
		2016	287,458	1,266,901	635,403	102.30

NO	Kabupaten/Kota	TAHUN	PAD (X1)	DANA PERIMBANGAN (X2)	BELANJA MODAL (X3)	KINERJA KEUANGAN PEMDA (Y)
9	Kab. Grobogan	2012	105,463	976,817	190,075	92.55
		2013	143,586	1,074,896	353,074	91.98
		2014	235,295	1,130,745	300,522	100.65
		2015	272,718	1,186,215	294,828	95.30
		2016	334,951	1,320,252	494,861	106.76
10	Kab. Jepara	2012	129,077	853,436	297,197	90.47
		2013	133,778	938,844	158,799	91.60
		2014	231,673	1,012,161	188,924	100.65
		2015	270,252	1,105,250	330,419	95.69
		2016	322,510	1,383,616	397,079	104.32
11	Kab. Karanganyar	2012	116,707	837,078	122,761	91.57
		2013	161,716	900,708	148,479	95.56
		2014	215,299	955,829	223,288	94.98
		2015	255,446	1,031,781	241,653	94.94
		2016	301,308	1,390,153	382,070	105.73
12	Kab. Kebumen	2012	102,374	1,056,315	295,209	89.78
		2013	131,482	1,135,499	286,959	89.47
		2014	242,080	1,233,777	465,778	94.65
		2015	245,159	1,343,316	468,153	86.54
		2016	291,016	1,779,772	649,703	95.81
13	Kab. Kendal	2012	120,162	845,851	192,582	97.60
		2013	136,030	910,087	155,399	90.28
		2014	215,294	964,405	261,586	98.63
		2015	239,564	996,572	282,090	95.89
		2016	265,074	1,263,993	322,194	101.93
14	Kab. Klaten	2012	84,756	1,098,162	182,607	85.98
		2013	115,441	1,174,619	186,884	84.16
		2014	177,922	1,250,626	268,557	88.63
		2015	190,623	1,279,991	306,072	82.42
		2016	224,197	1,573,615	220,759	93.85
15	Kab. Kudus	2012	121,017	825,555	178,143	97.16
		2013	144,995	954,513	132,972	94.51
		2014	234,073	1,012,352	256,851	100.53
		2015	255,284	1,033,505	451,330	98.10
		2016	279,239	1,290,967	678,206	105.11
16	Kab. Magelang	2012	123,723	979,144	95,351	96.70
		2013	173,254	986,616	108,604	98.77
		2014	242,449	1,047,441	319,022	113.37
		2015	261,569	1,080,098	253,852	93.16
		2016	288,486	1,213,327	353,168	97.53

NO	Kabupaten/Kota	TAHUN	PAD (X1)	DANA PERIMBANGAN (X2)	BELANJA MODAL (X3)	KINERJA KEUANGAN PEMDA (Y)
17	Kab. Pati	2012	163,734	997,545	174,150	94.98
		2013	169,127	1,094,864	203,474	89.54
		2014	279,255	1,163,931	224,653	98.36
		2015	310,064	1,214,975	279,135	95.42
		2016	314,921	1,579,435	419,720	97.42
18	Kab. Pekalongan	2012	114,793	790,945	124,487	95.78
		2013	147,687	856,477	184,320	98.72
		2014	255,037	920,665	187,872	107.44
		2015	251,559	978,154	190,291	98.16
		2016	310,573	1,182,371	237,939	109.80
19	Kab. Pemalang	2012	97,951	965,594	128,367	89.25
		2013	136,362	1,029,202	249,976	91.64
		2014	217,345	1,100,399	164,389	97.85
		2015	230,435	1,201,018	267,767	91.98
		2016	275,458	1,507,813	246,080	102.68
20	Kab. Purbalingga	2012	103,756	757,604	126,673	92.88
		2013	122,859	830,569	112,767	95.15
		2014	202,594	868,375	112,250	102.92
		2015	215,622	901,366	170,646	95.18
		2016	251,817	1,175,813	299,154	103.17
21	Kab. Purworejo	2012	98,262	828,201	149,105	103.39
		2013	127,566	880,734	180,854	92.71
		2014	200,259	938,015	216,763	100.33
		2015	233,934	986,542	252,290	89.95
		2016	255,599	1,315,706	274,263	95.37
22	Kab. Rembang	2012	103,305	692,398	200,204	93.11
		2013	126,808	716,784	135,448	90.08
		2014	165,531	775,863	151,455	92.14
		2015	193,123	852,722	51,981	96.88
		2016	234,168	935,944	345,546	99.79
23	Kab. Semarang	2012	156,104	809,788	264,417	96.04
		2013	215,680	879,110	227,584	104.25
		2014	248,213	955,996	272,265	104.72
		2015	278,852	952,251	229,911	102.69
		2016	318,536	1,325,780	381,465	107.15
24	Kab. Sragen	2012	127,696	890,242	125,506	92.11
		2013	146,722	974,780	141,264	91.40
		2014	254,392	1,051,510	267,219	98.31
		2015	267,712	1,154,056	324,141	93.44
		2016	297,176	1,442,581	325,397	103.73



NO	Kabupaten/Kota	TAHUN	PAD (X1)	DANA PERIMBANGAN (X2)	BELANJA MODAL (X3)	KINERJA KEUANGAN PEMDA (Y)
25	Kab. Sukoharjo	2012	164,954	760,616	233,724	97.71
		2013	192,972	844,526	209,691	98.82
		2014	264,814	907,272	197,958	103.81
		2015	313,947	944,641	265,949	103.78
		2016	363,163	1,246,955	327,611	112.47
26	Kab. Tegal	2012	118,742	990,986	303,315	93.90
		2013	156,245	1,071,845	215,975	92.60
		2014	253,717	1,142,423	226,088	97.95
		2015	304,001	1,186,589	255,208	96.70
		2016	316,051	1,195,240	516,642	146.20
27	Kab. Temanggung	2012	78,515	707,239	162,080	92.37
		2013	102,080	743,028	103,806	93.93
		2014	160,727	808,980	198,452	98.95
		2015	212,498	849,969	320,338	97.30
		2016	281,328	1,062,556	398,487	106.53
28	Kab. Wonogiri	2012	100,037	948,633	185,814	88.82
		2013	111,593	1,039,363	192,049	88.02
		2014	182,149	1,088,639	223,888	90.95
		2015	211,209	1,146,101	311,991	87.55
		2016	218,605	1,470,168	404,554	97.85
29	Kab. Wonosobo	2012	82,335	697,594	189,467	87.45
		2013	108,730	758,139	138,195	90.10
		2014	175,319	824,656	206,098	99.56
		2015	182,608	836,383	257,421	92.98
		2016	199,895	1,079,171	146,993	99.70
30	Kota Magelang	2012	91,315	397,902	79,136	107.34
		2013	107,740	431,113	142,589	109.88
		2014	164,928	459,785	127,624	120.85
		2015	186,677	462,805	141,309	123.46
		2016	220,316	567,637	221,924	132.61
31	Kota Pekalongan	2012	91,206	410,000	103,506	103.85
		2013	114,252	450,220	131,316	108.96
		2014	144,065	475,269	159,183	111.58
		2015	152,045	491,178	157,669	110.39
		2016	178,604	598,621	201,951	120.46
32	Kota Salatiga	2012	77,799	387,038	124,905	102.76
		2013	106,100	403,864	69,204	110.81
		2014	165,748	449,752	120,273	121.44
		2015	167,011	455,983	107,149	119.63
		2016	203,769	569,850	267,295	123.69

NO	Kabupaten/Kota	TAHUN	PAD (X1)	DANA PERIMBANGAN (X2)	BELANJA MODAL (X3)	KINERJA KEUANGAN PEMDA (Y)
33	Kota Semarang	2012	779,617	1,167,240	351,854	143.63
		2013	925,919	1,191,098	591,011	153.44
		2014	1,138,367	1,274,767	800,181	165.52
		2015	1,201,582	1,270,371	726,140	168.44
		2016	1,491,646	1,644,278	1,026,717	167.14
34	Kota Surakarta	2012	231,672	710,270	186,150	108.61
		2013	298,401	750,067	244,976	115.48
		2014	335,660	797,295	286,492	116.36
		2015	372,798	755,728	235,830	121.28
		2016	425,503	1,103,860	307,534	128.35
35	Kota Tegal	2012	156,663	394,763	73,304	100.58
		2013	176,377	430,499	100,804	124.80
		2014	241,936	437,444	115,599	138.29
		2015	271,601	500,850	207,499	135.76
		2016	287,344	688,199	248,511	134.56

## Lampiran 4. Hasil Analisis Regresi

### A. Data Uji Analisis Statistik Deskriptif

		Statistics			
		PAD	Dana_Perimban gan	Belanja_Modal	Kinerja_Keuangan
N	Valid	175	175	175	175
	Missing	0	0	0	0
Mean		233438.34	1000565.49	273814.07	101.5538
Median		203769.00	979144.00	241653.00	97.8500
Std. Deviation		178266.176	302544.471	154682.680	14.84425
Variance		31778829466.5	91533156981.2	23926731513.9	220.352
Range		58	28	03	
Range		1413847	1554108	974736	86.02
Minimum		77799	387038	51981	82.42
Maximum		1491646	1941146	1026717	168.44

### B. Data Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		175
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	7,34197918
Most Extreme Differences	Absolute	,093
	Positive	,093
	Negative	-,068
Kolmogorov-Smirnov Z		1,229
Asymp. Sig. (2-tailed)		,098

a. Test distribution is Normal.

## 2. Uji Multikolinieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	92,481	1,871		49,423	,000		
	lag_PAD	7,700E-5	,000	,930	16,005	,000	,510	1,962
	lag_DP	-2,402E-5	,000	-,502	-8,634	,000	,508	1,967
	lag_BM	6,390E-6	,000	,069	,968	,334	,340	2,943

a. Dependent Variable: lag\_KKD

## 3. Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,841 <sup>a</sup>	,708	,702	7,40648	1,901

a. Predictors: (Constant), lag\_BM, lag\_PAD, lag\_DP

b. Dependent Variable: lag\_KKD

## 4. Uji Heteroskedastisitas

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,300 <sup>a</sup>	,090	,058	145,53506	1,750

a. Predictors: (Constant), DP\_BM\_kw, PAD\_kw, DP\_kw, PAD\_DP\_kw, BM\_kw, PAD\_BM\_kw

b. Dependent Variable: RES\_kw

Tabel *Chi Square*

DF	P										
	0.995	0.975	0.20	0.10	0.05	0.025	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001
150	109.142	117.985	164.349	172.581	179.581	185.800	187.678	193.208	198.360	204.723	209.265
151	109.994	118.871	165.398	173.655	180.676	186.914	188.797	194.342	199.509	205.889	210.443
152	110.846	119.759	166.446	174.729	181.770	188.026	189.915	195.476	200.657	207.054	211.620
153	111.698	120.646	167.495	175.803	182.865	189.139	191.033	196.609	201.804	208.219	212.797
154	112.551	121.534	168.543	176.876	183.959	190.251	192.150	197.742	202.951	209.383	213.973
155	113.405	122.423	169.591	177.949	185.052	191.362	193.267	198.874	204.098	210.547	215.149
156	114.259	123.312	170.639	179.022	186.146	192.474	194.384	200.006	205.244	211.710	216.324
157	115.113	124.201	171.686	180.094	187.239	193.584	195.500	201.138	206.390	212.873	217.499
158	115.968	125.090	172.734	181.167	188.332	194.695	196.616	202.269	207.535	214.035	218.673
159	116.823	125.980	173.781	182.239	189.424	195.805	197.731	203.400	208.680	215.197	219.846
160	117.679	126.870	174.828	183.311	190.516	196.915	198.846	204.530	209.824	216.358	221.019
161	118.536	127.761	175.875	184.382	191.608	198.025	199.961	205.660	210.968	217.518	222.191
162	119.392	128.651	176.922	185.454	192.700	199.134	201.076	206.790	212.111	218.678	223.363
163	120.249	129.543	177.969	186.525	193.791	200.243	202.190	207.919	213.254	219.838	224.535
164	121.107	130.434	179.016	187.596	194.883	201.351	203.303	209.047	214.396	220.997	225.705
165	121.965	131.326	180.062	188.667	195.973	202.459	204.417	210.176	215.539	222.156	226.876
166	122.823	132.218	181.109	189.737	197.064	203.567	205.530	211.304	216.680	223.314	228.045
167	123.682	133.111	182.155	190.808	198.154	204.675	206.642	212.431	217.821	224.472	229.215
168	124.541	134.003	183.201	191.878	199.244	205.782	207.755	213.558	218.962	225.629	230.383
169	125.401	134.897	184.247	192.948	200.334	206.889	208.867	214.685	220.102	226.786	231.552
170	126.261	135.790	185.293	194.017	201.423	207.995	209.978	215.812	221.242	227.942	232.719
171	127.122	136.684	186.338	195.087	202.513	209.102	211.090	216.938	222.382	229.098	233.887
172	127.983	137.578	187.384	196.156	203.602	210.208	212.201	218.063	223.521	230.253	235.053
173	128.844	138.472	188.429	197.225	204.690	211.313	213.311	219.189	224.660	231.408	236.220
174	129.706	139.367	189.475	198.294	205.779	212.419	214.422	220.314	225.798	232.563	237.385
175	130.568	140.262	190.520	199.363	206.867	213.524	215.532	221.438	226.936	233.717	238.551
176	131.430	141.157	191.565	200.432	207.955	214.628	216.641	222.563	228.074	234.870	239.716
177	132.293	142.053	192.610	201.500	209.042	215.733	217.751	223.687	229.211	236.023	240.880
178	133.157	142.949	193.654	202.568	210.130	216.837	218.860	224.810	230.347	237.176	242.044
179	134.020	143.845	194.699	203.636	211.217	217.941	219.969	225.933	231.484	238.328	243.207
180	134.884	144.741	195.743	204.704	212.304	219.044	221.077	227.056	232.620	239.480	244.370
181	135.749	145.638	196.788	205.771	213.391	220.148	222.185	228.179	233.755	240.632	245.533
182	136.614	146.535	197.832	206.839	214.477	221.251	223.293	229.301	234.891	241.783	246.695
183	137.479	147.432	198.876	207.906	215.563	222.353	224.401	230.423	236.026	242.933	247.857
184	138.344	148.330	199.920	208.973	216.649	223.456	225.508	231.544	237.160	244.084	249.018
185	139.210	149.228	200.964	210.040	217.735	224.558	226.615	232.665	238.294	245.234	250.179

Keterangan:

Jumlah data  $n = 175$  , nilai signifikansi 5%

$df = 175 - 1 = 174$

### C. Data Hasil Regresi Linier Sederhana

#### 1. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Pendapatan Asli Daerah

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,733 <sup>a</sup>	,538	,535	9,25782

a.Predictors: (Constant), lag\_PAD

b.Dependent Variable: lag\_KKD

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17151,198	1	17151,198	200,114	,000 <sup>a</sup>
	Residual	14741,631	172	85,707		
	Total	31892,828	173			

a.Predictors: (Constant), lag\_PAD

b.Dependent Variable: lag\_KKD

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	76,341	1,124		67,896	,000
lag_PAD	6,073E-5	,000	,733	14,146	,000

a. Dependent Variable: lag\_KKD

## 2. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Dana Perimbangan

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,001 <sup>a</sup>	,000	-,006	13,61702

a. Predictors: (Constant), lag\_DP

b. Dependent Variable: lag\_KKD

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,017	1	,017	,000	,992 <sup>a</sup>
	Residual	31892,811	172	185,423		
	Total	31892,828	173			

a. Predictors: (Constant), lag\_DP

b. Dependent Variable: lag\_KKD

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	88,798	3,351		26,495	,000
	lag_DP	-3,496E-8	,000	-,001	-,010	,992

a. Dependent Variable: lag\_KKD

### 3. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Belanja Modal

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,368 <sup>a</sup>	,135	,130	12,66185

a. Predictors: (Constant), lag\_BM

b. Dependent Variable: lag\_KKD

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4317,375	1	4317,375	26,929	,000 <sup>a</sup>
	Residual	27575,453	172	160,322		
	Total	31892,828	173			

a. Predictors: (Constant), lag\_BM

b. Dependent Variable: lag\_KKD

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	80,589	1,845		43,672	,000
	lag_BM	3,412E-5	,000	,368	5,189	,000

a. Dependent Variable: lag\_KKD



4. Tabel t

Titik Persentase Distribusi t (df = 161 –200)

Pr df	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
161	0.67602	1.28683	1.65437	1.97481	2.34973	2.60671	3.14162
162	0.67601	1.28680	1.65431	1.97472	2.34959	2.60652	3.14130
163	0.67600	1.28677	1.65426	1.97462	2.34944	2.60633	3.14098
164	0.67599	1.28673	1.65420	1.97453	2.34930	2.60614	3.14067
165	0.67598	1.28670	1.65414	1.97445	2.34916	2.60595	3.14036
166	0.67597	1.28667	1.65408	1.97436	2.34902	2.60577	3.14005
167	0.67596	1.28664	1.65403	1.97427	2.34888	2.60559	3.13975
168	0.67595	1.28661	1.65397	1.97419	2.34875	2.60541	3.13945
169	0.67594	1.28658	1.65392	1.97410	2.34862	2.60523	3.13915
170	0.67594	1.28655	1.65387	1.97402	2.34848	2.60506	3.13886
171	0.67593	1.28652	1.65381	1.97393	2.34835	2.60489	3.13857
172	0.67592	1.28649	1.65376	1.97385	2.34822	2.60471	3.13829
173	0.67591	1.28646	1.65371	1.97377	2.34810	2.60455	3.13801
174	0.67590	1.28644	1.65366	1.97369	2.34797	2.60438	3.13773
175	0.67589	1.28641	1.65361	1.97361	2.34784	2.60421	3.13745
176	0.67589	1.28638	1.65356	1.97353	2.34772	2.60405	3.13718
177	0.67588	1.28635	1.65351	1.97346	2.34760	2.60389	3.13691
178	0.67587	1.28633	1.65346	1.97338	2.34748	2.60373	3.13665
179	0.67586	1.28630	1.65341	1.97331	2.34736	2.60357	3.13638
180	0.67586	1.28627	1.65336	1.97323	2.34724	2.60342	3.13612
181	0.67585	1.28625	1.65332	1.97316	2.34713	2.60326	3.13587
182	0.67584	1.28622	1.65327	1.97308	2.34701	2.60311	3.13561
183	0.67583	1.28619	1.65322	1.97301	2.34690	2.60296	3.13536
184	0.67583	1.28617	1.65318	1.97294	2.34678	2.60281	3.13511
185	0.67582	1.28614	1.65313	1.97287	2.34667	2.60267	3.13487
186	0.67581	1.28612	1.65309	1.97280	2.34656	2.60252	3.13463
187	0.67580	1.28610	1.65304	1.97273	2.34645	2.60238	3.13438
188	0.67580	1.28607	1.65300	1.97266	2.34635	2.60223	3.13415
189	0.67579	1.28605	1.65296	1.97260	2.34624	2.60209	3.13391
190	0.67578	1.28602	1.65291	1.97253	2.34613	2.60195	3.13368
191	0.67578	1.28600	1.65287	1.97246	2.34603	2.60181	3.13345
192	0.67577	1.28598	1.65283	1.97240	2.34593	2.60168	3.13322
193	0.67576	1.28595	1.65279	1.97233	2.34582	2.60154	3.13299
194	0.67576	1.28593	1.65275	1.97227	2.34572	2.60141	3.13277
195	0.67575	1.28591	1.65271	1.97220	2.34562	2.60128	3.13255
196	0.67574	1.28589	1.65267	1.97214	2.34552	2.60115	3.13233
197	0.67574	1.28586	1.65263	1.97208	2.34543	2.60102	3.13212
198	0.67573	1.28584	1.65259	1.97202	2.34533	2.60089	3.13190
199	0.67572	1.28582	1.65255	1.97196	2.34523	2.60076	3.13169
200	0.67572	1.28580	1.65251	1.97190	2.34514	2.60063	3.13148

Keterangan:

t tabel ( $\alpha/2$  ; N-k-1)

t tabel (0,05/2 ;175-3-1)

t tabel (0,025 ; 171)

sehingga didapatkan  $t_{\text{tabel}} = 1,9739$

## D. Data Hasil Regresi Linier Berganda

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	lag_BM, lag_PAD, lag_DP <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: lag\_KKD

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,841 <sup>a</sup>	,708	,702	7,40648	1,901

a. Predictors: (Constant), lag\_BM, lag\_PAD, lag\_DP

b. Dependent Variable: lag\_KKD

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22567,322	3	7522,441	137,131	,000 <sup>a</sup>
	Residual	9325,506	170	54,856		
	Total	31892,828	173			

a. Predictors: (Constant), lag\_BM, lag\_PAD, lag\_DP

b. Dependent Variable: lag\_KKD

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	92,481	1,871		49,423	,000		
lag_PAD	7,700E-5	,000	,930	16,005	,000	,510	1,962
lag_DP	-2,402E-5	,000	-,502	-8,634	,000	,508	1,967
lag_BM	6,390E-6	,000	,069	,968	,334	,340	2,943

a. Dependent Variable: lag\_KKD

1. Tabel F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74
137	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
138	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
139	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
140	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
141	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
142	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
143	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
144	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
145	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
146	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.74
147	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
148	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
149	3.90	3.06	2.67	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
150	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
151	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
152	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
153	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
154	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
155	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
156	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
157	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
158	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
159	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
160	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
161	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
162	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
163	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
164	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
165	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
166	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
167	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
168	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
169	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
170	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
171	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
172	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
173	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
174	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
175	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
176	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72

Keterangan:

$$Df \text{ untuk } N1 = (\text{variabel dependen} + \text{variabel independen}) - 1 = 4 - 1 = 3$$

$$Df \text{ untuk } N2 = \text{Jumlah data} - \text{jumlah variabel} (175 - 4) = 171$$

$$F_{\text{tabel}} \text{ pada penelitian ini} = 2,66$$